#### DAFTAR ISIAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Desa: CIHERANG Kecamatan: Pasawahan Kabupaten: KAB. PURWAKARTA Provinsi: JAWA BARAT

Bulan: 5 Tahun: 2023

Nama Pengisi: JAJAT KUSWANDI Pekerjaan: Staff Desa Jabatan: Kaur Perencanaan

Kepala Desa / Lurah: NANDANG

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN

Referensi 1 : Buku Data Induk RT / RW

Referensi 2: Buku Data Kesehatan Kader Kesehatan / Posyandu Desa

Referensi 3: Keterangan Tokoh Masyarakat Referensi 4: Profil Desa / Data Monografi Desa

#### I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk			
Jumlah	Jenis Kelamin		
outilian	Laki-laki	Perempuan	
Jumlah penduduk tahun ini	2113 orang	2082 orang	
Jumlah penduduk tahun lalu	2200 orang	2071 orang	
Persentase perkembangan	-3.95 %	0.53 %	

#### B. Jumlah Keluarga

D. Julillan Keluarga			
Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	1160 KK	284 KK	1444 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	1124 KK	299 KK	1423 KK
Prosentase Perkembangan	3.2 %	-5.02 %	

#### II. EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengangguran	
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	1019 orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	374 orang

3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga 924 orang

4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh331 orang5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu656 orang

6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja 7 orang

7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja 2 orang

# B. Kesejahteraan Keluarga

1. Jumlah keluarga prasejahtera	340 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1	420 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	345 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	239 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	190 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga	1534 keluarga

#### III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO

#### A. SUBSEKTOR PERTANIAN

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)
Jagung	3	0	0	0	0	0	0
Ubi jalar	3	0	0	0	0	0	0
Mentimun	1	0	0	0	0	0	0
Kacang kedelai	1	0	0	0	0	0	0
Terong	1	0	0	0	0	0	0
Bayam	2	0	0	0	0	0	0
Kangkung	7	0	0	0	0	0	0
Kacang tanah	3	0	0	0	0	0	0
Kacang panjang	2	0	0	0	0	0	0

## B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)
Kelapa	5	10.8	0	0	0	0	0
Jambu Mete	0.5	0	0	0	0	0	0

## C. SUBSEKTOR PETERNAKAN

Jenis Produksi	Hasil Produksi	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)	Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp)	Jumlah Ternak (Ekor)
Susu	0	0	0	0	0
Kulit	0	0	0	0	0
Telur	300 kg	0	0	0	0
Daging	0	0	0	0	0
Madu	0	0	0	0	0
Bulu	0	0	0	0	0
Air liur burung walet	0	0	0	0	0
Minyak	0	0	0	0	0
Hiasan/lukisan	0	0	0	0	0
Cinderamata	0	0	0	0	0

## D. SUBSEKTOR PERIKANAN

Jenis Produksi	Hasil Produksi (Ton/Tahun)	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)	Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp)	yang dihabiskan (Rp)	Jenis usaha perikanan
Tuna	0		0			(
Salmon	0	0	0			(
Tongkol/cakalang	0	0	0	0	0	(
Hiu	0	0	0		0	(
Kakap	0	0	0	0	0	
Tenggiri	0	0	0		0	
Jambal	0	0	0			
Pari	0	0	0	0	0	
Kuwe	0	0	0	0	0	
Belanak	0	0	0	0	0	
Cumi	0	0	0	0	0	
Gurita	0	0	0	0	0	
Sarden	0	0	0	0	0	
Bawal	0	0	0	0	0	
Baronang	0	0	0	0	0	
Kembung	0	0	0	0	0	
Ikan ekor kuning	0	0	0	0	0	
Kerapu/Sunuk	0	0	0	0	0	
Teripang	0	0	0	0	0	
Barabara	0	0	0		0	
Cucut	0	0	0		0	
Layur	0	0	0	0	0	
Ayam-ayam	0	0	0			
Udang/lobster	0	0	0			
Tembang	0	-	0			
Bandeng	0	0	0			
Nener	0	0	0			
Kerang	0	0	0			
Kepiting	0	0	0			
Mas	0	0	0			
Rajungan	0	0	0			
Mujair	0		0			
Lele	0	0	0			
Gabus	0	0	0			
Patin	0	0	0			
Nila	0	0	0			
Sepat	0	0	0			
Gurame	0	0	0			
Belut	0	0	0			
Penyu	0	0	0			
Rumput laut	0	0	0			
Kodok	0	0	0			
Katak	0	0	0			
Natur			0		, 0	

E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN	
Total nilai produksi tahun ini	Rp. 0,00
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp. 0,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskan	Rp. 0,00
Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada	0 jenis
F. SUBSEKTOR KERAJINAN	

Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total pinia bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total pinia kerajinan rumah tangga O jenis  G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN G. 1. Subsektor Industri Pakaian Total nilai potuksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilai potuksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilai potuksi tahun ini Rp. 0.00 Total pilai panis industri tahun panis digunakan Rp. 0.00 Total pilai panis industri tahun panis digunakan Rp. 0.00 Total pilai panis industri tahun panis digunakan Rp. 0.00 Total pilai panis industri Pangan Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai panis industri tahun ini Total nilai bahan panis ong digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai panis industri tahun ini Total unilai pinia industri tahun ini Rp. 0.00 Total pilai panis baku yang digunakan Rp. 0.00 Total pilai panis baku yang digunakan Rp. 0.00 Total pilai poduksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total ni
Total nilal bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total pians tarany ang dihabiskan Rp. 0.00 Total pians kerajinan rumah tangga  G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN G. 1. Subsektor Industri Pakalan Total nilal potaku si tahun ini Rp. 0.00 Total nilal potaku si tahun ini Rp. 0.00 Total nilal potaku si tahun ini Total nilal bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal potah penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal potah penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal potah penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal bahan baku yang digunakan Total nilal bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal potah penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total purlah pinsi industri bayang ada Rp. 0.00 Total purlah pinsi industri bayang ada Rp. 0.00 Total purlah pinsi penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total purlah pinsi penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal potah baku yang digunakan Rp. 0.00 Total purlah pinsi industri bayang ada Rp. 0.00 Total nilal potah pana penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal potah pana penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal potah pana penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal potah pana penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal potah pana penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal potah pana penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal bahan penolong yang digunaka
Total pinya antara yang dihabiskan Cital jenis kerajinan rumah tangga O jenis  S. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN G. 1. Subsektor Industri Pakalan Total nilai porduksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total pinya bahar yang dihabiskan Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total pinya bahar yang dihabiskan Rp. 0.00 Total pinya baku yang digunakan Rp. 0.00 Total pinya bahar yang dihabiskan Rp. 0.00 Total pinya panga panga digunakan Rp. 0.00 Total pinya antara yang dihabiskan Rp. 0.00 Total pinya panga digunakan Rp. 0.00 Total pinya a
Total jenis kerajinan rumah tangga  G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN  G.1. Subsektor Industri Pakalam  Total nilai potdust sitahun in  Rp. 0.00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilai potdust sitahun ini  Rp. 0.00  Total jumlah jenis industri teb yang ada  Industri Pengolahan Non Migas  Industri Pengolahan Non Migas  Rp. 0.00  Total jumlah jenis industri teb yang ada  Industri Pengolahan Non Migas  Rp. 0.00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilai bahan p
Total jenis kerajinan rumah tangga  G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN  G.1. Subsektor Industri Pakalam  Total nilai potdust sitahun in  Rp. 0.00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilai potdust sitahun ini  Rp. 0.00  Total jumlah jenis industri teb yang ada  Industri Pengolahan Non Migas  Industri Pengolahan Non Migas  Rp. 0.00  Total jumlah jenis industri teb yang ada  Industri Pengolahan Non Migas  Rp. 0.00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilai bahan p
G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN G.1. Subsektor Industri Pakaian Total nilai para baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total pimlah jenis industri tsb yang ada G.2. Subsektor Industri tsb yang ada G.3. Subsektor Industri tsb yang ada G.4. Subsektor Industri Pangan Total nilai para baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan yang dihabiskan Rp. 0,00 Total pimlah jenis industri tsb yang ada G.3. Industri Pengolahan Migas G.3. Industri Pengolahan Migas Total nilai para baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan yang dihabiskan Rp. 0,00 Total pimlah jenis industri tsb yang ada G.4. Industri Pengolahan Non Milgas G.5. Industri Pengolahan Non Milgas Rp. 0,00 Total pimlah jenis industri tsb yang ada G.6. Industri Pengolahan Non Milgas Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan
G.1. Subsektor Industri Pakaian Total nilai produksi tahun ini Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total jumlah jenis industri tsb yang ada G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total pimlah jenis industri tsb yang ada Rp. 0.00 Total pimlah jenis industri tsb yang ada Rp. 0.00 Total pimlah pensi ngunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total pimlah pensi ngunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan pencolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai poduksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilai bahan pencolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai parakay ang dihabakan Rp. 0.00 Total nilai parakay ang dipunakan Rp. 0.00 Total nilai parakay ang dipun
G.1. Subsektor Industri Pakaian Total nilai produksi tahun ini Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total jumlah jenis industri tsb yang ada G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total pimlah jenis industri tsb yang ada Rp. 0.00 Total pimlah jenis industri tsb yang ada Rp. 0.00 Total pimlah pensi ngunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total pimlah pensi ngunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan pencolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai poduksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilai bahan pencolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai parakay ang dihabakan Rp. 0.00 Total nilai parakay ang dipunakan Rp. 0.00 Total nilai parakay ang dipun
Total nilai produksi tahun ini Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total pilaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00 Total pilaya ginis industri bay yang ada  Gp. 0,00 Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai pahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total pilaya antara yang dijunakan Rp. 0,00 Total pilaya antara yang dijunakan Rp. 0,00 Total pilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total pilaya antara yang digunakan Rp. 0,00 Total pilaya antara yang digunakan Rp. 0,00 Total pilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total pilai poduksi tahun ini Rp. 0,00 Total pilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total pilai poduksi tahun ini Rp. 0,00 Total pilai poduksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai poduksi tahun penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai poduksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai poduksi poduksi na poduksi na poduksi na poduksi na poduks
Total nilai bahan beku yang digunakan Total nilai bahan penotong yang digunakan Total nilai bahan penotong yang digunakan Total nilai bahan penotong yang digunakan Rp. 0.00 Total jumlah jenis industri sb yang ada  G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi tahun ini Total nilai produksi tahun ini Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan penotong yang digunakan Rp. 0.00 Total jumlah jenis industri sb yang ada  G.3. Industri Pengolahan Migas G.3. Industri Pengolahan Migas Total nilai produksi tahun ini Rp. 0.00 Total jumlah jenis industri sb yang ada  G.3. Industri Pengolahan Migas  G.4. Industri Pengolahan Migas  Total nilai pana baku yang digunakan Rp. 0.00 Total pilai produksi tahun ini Rp. 0.00 Total pilai produksi tahun ini Rp. 0.00 Total pilai pinai haku yang digunakan Rp. 0.00 Total pilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total pilai pinai industri tsb yang ada  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total pilai pinai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total pilai pinai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total pilai pihah pikasi yang digunakan Rp. 0.00 Total pilai pihah pikasi pilai pikasi yang digunakan Rp. 0.00 Total pilai pihah pikasi pilai pinai pilai pi
Total nilai bahan penolong yang digunakan Total pimiah jenis industri sho yang ada  G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi tahun ini Total nilai produksi tahun ini Total nilai produksi tahun ini Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan baku yang digunakan Total pimiah penolong yang digunakan Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total pimiah jenis industri tish yang ada  G.3. Industri Pengolahan Non Migas Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total pimiah jenis industri tish yang ada  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  G.5. Industri Pengolahan Non Migas Total nilai produksi tahun ini Rp. 0.00 Total pimiah jenis industri tish yang ada  G.6. Industri Pengolahan Non Migas  G.7. Industri Pengolahan Non Migas  G.8. Industri Pengolahan Non Migas  G.9. O.00 Total pimiah jenis industri tish yang ada  G.9. O.00  Total nilai produksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total hilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0.00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0.00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0.00 Total hilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total hilai baha
Total jumlah jenis industri tab yang ada  G.2. Subsektor Industri Pangan  Total nilai produksi tahun ini Total nilai pahan baku yang digunakan Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00  Total jumlah jenis industri tab yang ada  G.3. Industri Pengolahan Migas  G.4. Industri Pengolahan Migas  Total nilai bahan baku yang digunakan  Total nilai bahan baku yang digunakan  Rp. 0,00  Total pimlah jenis industri tab yang ada  G.5. Industri Pengolahan Migas  G.6. Industri Pengolahan Migas  Gotal nilai poduksi tahun ini  Total nilai bahan baku yang digunakan  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Total nilai poduksi tahun ini  Rp. 0,00  Total pimlah jenis industri tab yang ada  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  G.5. Industri Pengolahan Non Migas  G.6. Industri Pengolahan Non Migas  Total nilai poduksi tahun ini  Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Total nilai bahan baku yang digunakan  Total nilai bahan baku yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai bahan baku yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total pimlah jenis industri tab yang ada  Pp. 0,00  Total pimlah jenis industri tab yang ada  Pp. 0,00  Total pimlah jenis industri tab yang ada  Pp. 0,00  Total pimlah jenis industri tab yang ada  Pp. 0,00  Total pimlah jenis industri tab yang ada  Pp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang di
Total jumlah jenis industri tab yang ada  G.2. Subsektor Industri Pangan  Total nilal produksi tahun ini  Total nilal produksi tahun ini  Total nilal produksi tahun ini  Total nilal bahan baku yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilal bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilal bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total jumlah jenis industri tab yang ada  G.3. Industri Pengolahan Migas  Total nilal produksi tahun ini  Rp. 0.00  Total nilal bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilal bahan baku yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilal bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilal bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total inilal bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total pumlah jenis industri tab yang ada  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  Total nilal bahan baku yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilal bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilal bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilal bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilal bahan baku yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilal produksi tahun ini  Rp. 0.00  Total nilal bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilal bahan pe
Total jumlah jenis industri tab yang ada  G.2. Subsektor Industri Pangan  Total nilal produksi tahun ini  Total nilal produksi tahun ini  Total nilal produksi tahun ini  Total nilal bahan baku yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilal bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilal bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total jumlah jenis industri tab yang ada  G.3. Industri Pengolahan Migas  Total nilal produksi tahun ini  Rp. 0.00  Total nilal bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilal bahan baku yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilal bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilal bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total inilal bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total pumlah jenis industri tab yang ada  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  Total nilal bahan baku yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilal bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilal bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilal bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilal bahan baku yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilal produksi tahun ini  Rp. 0.00  Total nilal bahan penolong yang digunakan  Rp. 0.00  Total nilal bahan pe
G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilal produksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilal pohan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total pilal panan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total jumlah jenis industri tsb yang ada Rp. 0.00 Total jumlah jenis industri tsb yang ada Rp. 0.00 Total pilal produksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilal produksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilal bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal produksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilal produksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilal produksi tahun ini Rp. 0.00 Total jumlah jenis industri tsb yang ada Rp. 0.00 Total jumlah jenis industri tsb yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal produksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilal bahan penolong yang digunakan
Total nilai produksi tahun ini Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total jumlah jenis industri tab yang ada  O jenis  G.3. Industri Pengolahan Migas  G.3. Industri Pengolahan Migas  Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total jumlah jenis industri tab yang ada  O jenis  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  Total nilai produksi tahun ini Rp. 0.00 Total jumlah jenis industri tab yang ada  O jenis  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  Total nilai produksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total pilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total pilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai produksi tahun ini Rp. 0.00 Total inilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total inilai produksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilai produksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilai produksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilai bahan penolong yang digunakan
Total nilai produksi tahun ini Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total jumlah jenis industri tab yang ada  O jenis  G.3. Industri Pengolahan Migas  G.3. Industri Pengolahan Migas  Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total jumlah jenis industri tab yang ada  O jenis  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  Total nilai produksi tahun ini Rp. 0.00 Total jumlah jenis industri tab yang ada  O jenis  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  Total nilai produksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total pilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total pilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai produksi tahun ini Rp. 0.00 Total inilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total inilai produksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilai produksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilai produksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilai bahan penolong yang digunakan
Total nilal bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total pimlah penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total pimlah penis industri tsb yang ada  G.3. Industri Pengolahan Migas Total nilal produksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilal bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total pimlah penis industri sb yang ada Rp. 0.00 Total nilal bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total pimlah penis industri tsb yang ada  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  G.5. Industri Pengolahan Non Migas  G.6. Industri Pengolahan Non Migas  Total nilal produksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilal bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total pimlah jenis industri tsb yang ada  Denis  H. SUBSEKTOR KEHUTANAN  Total nilal produksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilal bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilal bahan penolong yang digu
Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00 Total jumlah jenis industri tsb yang ada  G.3. Industri Pengolahan Migas  Total nilai produksi tahun ini Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total pilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total pilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total pilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total pilai produksi tahun ini  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total pilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total pilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total pilai produksi penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total pilai produksi penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan
Total biaya antara yang dihabiskan Olayinah jenis industri tsb yang ada Olayinah jenis industri tsb yang ada Olayinah jenis industri tsb yang ada Olayinah jenis industri tsb yang dagamakan Otal nilai produksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total jumlah jenis industri tsb yang ada Ojenis  G.4. Industri Pengolahan Non Migas Olati nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total pimlah jenis industri tsb yang ada Ojenis  H. SUBSEKTOR KEHUTANAN Total nilai produksi tahun ini Rp. 0.00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0.00 Total nilai bahan penolong yang dikeluarkan Rp. 0.00 Total nilai bahan penolong yang dikeluarkan Rp. 0.00 Total nilai bahan penolong yang dikeluarkan Rp. 0.00
Total jumlah jenis industri tsb yang ada  G.3. Industri Pengolahan Migas  Total nilai produksi tahun ini  Rp. 0,00  Total nilai bahan baku yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total pilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total jumlah jenis industri tsb yang ada  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  Total nilai produksi tahun ini  Rp. 0,00  Total nilai bahan baku yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total pilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total jumlah jenis industri tsb yang ada  G. jenis  H. SUBSEKTOR KEHUTANAN  Total nilai produksi tahun ini  Rp. 0,00  Total nilai produksi tahun ini  Rp. 0,00  Total nilai produksi yang digunakan  Rp. 0,00  Total pilai pahan baku yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai produksi yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai produksi yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai setar baku pang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai setar bardagangan pang ada  Rp. 0,00  Total nilai baya yang dikeluarkan  Rp. 0,00  Total nilai baya yang dikeluarkan  Rp. 0,00  Total biaya antara lainnya  Rp. 0,00  Total biaya antara lainnya
G.3. Industri Pengolahan Migas  Total nilai produksi tahun ini  Rp. 0,00  Total nilai bahan baku yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total jumlah jenis industri tsb yang ada  O jenis  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  Total nilai produksi tahun ini  Rp. 0,00  Total nilai bahan baku yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai produksi tahun ini  Rp. 0,00  Total nilai produksi tahun ini  Rp. 0,00  Total nilai produksi tahun ini  Rp. 0,00  Total nilai bahan baku yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai transaksi  Rp. 0,00  Total nilai transaksi  Rp. 0,00  Total nilai baya yang dikeluarkan  Rp. 0,00  Total nilai baya yang dikeluarkan  Rp. 0,00  Total biaya antara lainnya
Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00 Total jumlah jenis industri tsb yang ada Ojenis  G.4. Industri Pengolahan Non Migas Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total pilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total jumlah jenis industri tsb yang ada Ojenis  H. SUBSEKTOR KEHUTANAN Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total pilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total jumlah jenis industri tsb yang ada Ojenis  H. SUBSEKTOR KEHUTANAN Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai ala di ana penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai di aset perdagangan Besar Total nilai transaksi Rp. 0,00 Total nilai i aset perdagangan besar Rp. 0,00 Total nilai baya yang dikeluarkan Rp. 0,00 Total balaya antara lainnya dikeluarkan Rp. 0,00
Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00 Total jumlah jenis industri tsb yang ada Ojenis  G.4. Industri Pengolahan Non Migas Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total jumlah jenis industri tsb yang ada Rp. 0,00 Total produksi tahun ini Rp. 0,00 Total produksi tahun ini Rp. 0,00 Total produksi tahun ini Rp. 0,00 Total jumlah jenis industri tsb yang ada Ojenis  H. SUBSEKTOR KEHUTANAN Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai alai transaksi Rp. 0,00 Total nilai tahun penolong da Rp. 0,00 Total nilai tansaksi Rp. 0,00 Total nilai tansaksi Rp. 0,00 Total nilai tansaksi Rp. 0,00 Total nilai baya yang dikeluarkan Rp. 0,00 Total nilai baya yang dikeluarkan Rp. 0,00 Total nilai baya yang dikeluarkan Rp. 0,00 Total biaya antara lainnya
Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00 Total jumlah jenis industri tsb yang ada Ojenis  G.4. Industri Pengolahan Non Migas Total nilai penduksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai penduksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total jumlah jenis industri tsb yang ada Ojenis  H. SUBSEKTOR KEHUTANAN Total nilai penduksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total pilai penduksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai tahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai alai arasa yang dihabiskan Rp. 0,00 Total nilai asa teperdagangan Besar Total nilai transaksi Rp. 0,00 Total nilai isaset perdagangan yang ada Rp. 0,00 Total nilai baya yang dikeluarkan Rp. 0,00
Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total hilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00 Total jumlah jenis industri tsb yang ada 0 jenis  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total pimlah jenis industri tsb yang ada 0 jenis  H. SUBSEKTOR KEHUTANAN Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai sa pendagangan Besar Rp. 0,00 Total nilai sa perdagangan Besar Rp. 0,00 Total nilai aset perdagangan besar Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai aset perdagangan besar Rp. 0,00 Total nilai baya yang dikeluarkan Rp. 0,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00 Total biaya antara yang dihabiskan 0 jenis  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00 Total piunlah jenis industri tsb yang ada 0 jenis  H. SUBSEKTOR KEHUTANAN  Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai sat perdagangan Besar Rp. 0,00 Total nilai sat perdagangan besar Rp. 0,00 Total nilai aset perdagangan yang ada Rp. 0,00 Total nilai sat perdagangan besar Rp. 0,00 Total nilai baya yang dikeluarkan Rp. 0,00 Total biaya antara lainnya
Total biaya antara yang dihabiskan  Total jumlah jenis industri tsb yang ada  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  Total nilai produksi tahun ini  Rp. 0,00  Total nilai bahan baku yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total jumlah jenis industri tsb yang ada  Rp. 0,00  Total jumlah jenis industri tsb yang ada  Rp. 0,00  Total jumlah jenis industri tsb yang ada  Rp. 0,00  Total nilai bahan baku yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai produksi tahun ini  Rp. 0,00  Total nilai produksi tahun ini  Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai tahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai tahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai transaksi  Rp. 0,00  Total nilai transaksi  Rp. 0,00  Total nilai set perdagangan pesar  Rp. 0,00  Total nilai set perdagangan besar  Rp. 0,00  Total nilai baya yang dikeluarkan  Rp. 0,00  Total nilai baya yang dikeluarkan  Rp. 0,00  Total nilai baya antara lainnya
Total jumlah jenis industri tsb yang ada  G.4. Industri Pengolahan Non Migas  Total nilai produksi tahun ini  Rp. 0,00  Total nilai bahan baku yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total pilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total pilai pendusit tsb yang ada  O jenis  H. SUBSEKTOR KEHUTANAN  Total nilai produksi tahun ini  Rp. 0,00  Total nilai produksi tahun ini  Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai sahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai pendagangan besar  Rp. 0,00  Total nilai sahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai jahay yang dikeluarkan  Rp. 0,00  Total biaya antara lainnya  Rp. 0,00  Total biaya antara lainnya
G.4. Industri Pengolahan Non Migas  Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00  Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00  Total jumlah jenis industri tsb yang ada  H. SUBSEKTOR KEHUTANAN  Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00  Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00  Total nilai pahan baku yang digunakan Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00  Total nilai sahan penolong yang digunakan Rp. 0,00  Total nilai sat perdagangan Besar  Total nilai sat perdagangan besar  Total nilai set perdagangan besar Rp. 0,00  Total nilai biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00  Total hiaya antara lainnya Rp. 0,00  Total biaya antara lainnya Rp. 0,00
Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00 Total jumlah jenis industri tsb yang ada O jenis  H. SUBSEKTOR KEHUTANAN Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00  I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN I.1. Subsektor Perdagangan Besar Total nilai taest perdagangan yang ada Rp. 0,00 Total nilai aset perdagangan yang ada Rp. 0,00 Total nilai sest perdagangan besar Rp. 0,00 Total nilai sest perdagangan besar Rp. 0,00 Total nilai biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00 Total biaya antara lainnya Rp. 0,00 Total biaya antara lainnya Rp. 0,00
Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00 Total jumlah jenis industri tsb yang ada O jenis  H. SUBSEKTOR KEHUTANAN Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00  I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN I.1. Subsektor Perdagangan Besar Total nilai taest perdagangan yang ada Rp. 0,00 Total nilai aset perdagangan yang ada Rp. 0,00 Total nilai sest perdagangan besar Rp. 0,00 Total nilai sest perdagangan besar Rp. 0,00 Total nilai biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00 Total biaya antara lainnya Rp. 0,00 Total biaya antara lainnya Rp. 0,00
Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00 Total jumlah jenis industri tsb yang ada O jenis  H. SUBSEKTOR KEHUTANAN Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00  I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN I.1. Subsektor Perdagangan Besar Total nilai taest perdagangan yang ada Rp. 0,00 Total nilai aset perdagangan yang ada Rp. 0,00 Total nilai sest perdagangan besar Rp. 0,00 Total nilai sest perdagangan besar Rp. 0,00 Total nilai biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00 Total biaya antara lainnya Rp. 0,00 Total biaya antara lainnya Rp. 0,00
Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total pinah jenis industri tsb yang ada O jenis  H. SUBSEKTOR KEHUTANAN Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan yang dihabiskan Rp. 0,00  I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN I.1. Subsektor Perdagangan Besar Total nilai tansaksi Rp. 0,00 Total nilai saet perdagangan yang ada Rp. 0,00 Total nilai seet perdagangan besar Rp. 0,00 Total nilai seet perdagangan besar Rp. 0,00 Total nilai biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00 Total nilai biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00 Total biaya antara lainnya Rp. 0,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00 Total jumlah jenis industri tsb yang ada 0 jenis  H. SUBSEKTOR KEHUTANAN Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00  I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN I.1. Subsektor Perdagangan Besar Total nilai transaksi Rp. 0,00 Total jumlah jenis perdagangan yang ada Rp. 0,00 Total jumlah jenis perdagangan besar Rp. 0,00 Total jumlah jenis perdagangan besar Rp. 0,00 Total nilai biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00 Total biaya antara lainnya Rp. 0,00 Total biaya antara lainnya Rp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00 Total jumlah jenis industri tsb yang ada  H. SUBSEKTOR KEHUTANAN Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00  I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN I.1. Subsektor Perdagangan Besar Total nilai transaksi Rp. 0,00 Total nilai aset perdagangan yang ada Rp. 0,00 Total nilai aset perdagangan besar Rp. 0,00 Total nilai biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00 Total nilai biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00 Total biaya antara lainnya Rp. 0,00 Total biaya antara lainnya Rp. 0,00
Total jumlah jenis industri tsb yang ada  H. SUBSEKTOR KEHUTANAN  Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00  I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN I.1. Subsektor Perdagangan Besar Total nilai transaksi Rp. 0,00 Total nilai set perdagangan yang ada Rp. 0,00 Total jumlah jenis perdagangan besar Rp. 0,00 Total jumlah jenis perdagangan besar Rp. 0,00 Total nilai biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00 Total biaya antara lainnya Rp. 0,00
H. SUBSEKTOR KEHUTANAN  Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00  I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN I.1. Subsektor Perdagangan Besar  Total nilai transaksi Rp. 0,00 Total nilai aset perdagangan yang ada Rp. 0,00 Total jumlah jenis perdagangan besar Rp. 0,00 Total nilai biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00 Total biaya antara lainnya Rp. 0,00
Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00  I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN I.1. Subsektor Perdagangan Besar Total nilai transaksi Rp. 0,00 Total nilai transaksi Rp. 0,00 Total nilai seet perdagangan yang ada Rp. 0,00 Total jumlah jenis perdagangan besar Rp. 0,00 Total nilai biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00 Total biaya antara lainnya Rp. 0,00
Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00  I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN I.1. Subsektor Perdagangan Besar Total nilai transaksi Rp. 0,00 Total nilai transaksi Rp. 0,00 Total nilai seet perdagangan yang ada Rp. 0,00 Total jumlah jenis perdagangan besar Rp. 0,00 Total nilai biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00 Total biaya antara lainnya Rp. 0,00
Total nilai produksi tahun ini Rp. 0,00 Total nilai bahan baku yang digunakan Rp. 0,00 Total nilai bahan penolong yang digunakan Rp. 0,00 Total biaya antara yang dihabiskan Rp. 0,00  I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN I.1. Subsektor Perdagangan Besar Total nilai transaksi Rp. 0,00 Total nilai transaksi Rp. 0,00 Total nilai seet perdagangan yang ada Rp. 0,00 Total jumlah jenis perdagangan besar Rp. 0,00 Total nilai biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00 Total biaya antara lainnya Rp. 0,00
Total nilai bahan baku yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total biaya antara yang dihabiskan  Rp. 0,00  I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN  I.1. Subsektor Perdagangan Besar  Total nilai transaksi  Rp. 0,00  Total nilai aset perdagangan yang ada  Rp. 0,00  Total jumlah jenis perdagangan besar  Rp. 0,00  Total nilai biaya yang dikeluarkan  Rp. 0,00  Total biaya antara lainnya  Rp. 0,00
Total nilai bahan baku yang digunakan  Rp. 0,00  Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total biaya antara yang dihabiskan  Rp. 0,00  I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN  I.1. Subsektor Perdagangan Besar  Total nilai transaksi  Rp. 0,00  Total nilai aset perdagangan yang ada  Rp. 0,00  Total jumlah jenis perdagangan besar  Rp. 0,00  Total nilai biaya yang dikeluarkan  Rp. 0,00  Total biaya antara lainnya  Rp. 0,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan  Rp. 0,00  Total biaya antara yang dihabiskan  Rp. 0,00  I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN  I.1. Subsektor Perdagangan Besar  Total nilai transaksi  Rp. 0,00  Total nilai aset perdagangan yang ada  Rp. 0,00  Total jumlah jenis perdagangan besar  Rp. 0,00  Total nilai biaya yang dikeluarkan  Rp. 0,00  Total biaya antara lainnya  Rp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskan  I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN  I.1. Subsektor Perdagangan Besar  Total nilai transaksi  Rp. 0,00  Total nilai aset perdagangan yang ada  Rp. 0,00  Total jumlah jenis perdagangan besar  Rp. 0,00  Total nilai biaya yang dikeluarkan  Rp. 0,00  Total biaya antara lainnya  Rp. 0,00
I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN  I.1. Subsektor Perdagangan Besar  Total nilai transaksi  Rp. 0,00  Total nilai aset perdagangan yang ada  Rp. 0,00  Total jumlah jenis perdagangan besar  Rp. 0,00  Total nilai biaya yang dikeluarkan  Rp. 0,00  Total biaya antara lainnya  Rp. 0,00
I.1. Subsektor Perdagangan Besar  Total nilai transaksi  Rp. 0,00  Total nilai aset perdagangan yang ada  Rp. 0,00  Total jumlah jenis perdagangan besar  Rp. 0,00  Total nilai biaya yang dikeluarkan  Rp. 0,00  Total biaya antara lainnya  Rp. 0,00
I.1. Subsektor Perdagangan Besar  Total nilai transaksi  Rp. 0,00  Total nilai aset perdagangan yang ada  Rp. 0,00  Total jumlah jenis perdagangan besar  Rp. 0,00  Total nilai biaya yang dikeluarkan  Rp. 0,00  Total biaya antara lainnya  Rp. 0,00
Total nilai transaksi  Rp. 0,00  Total nilai aset perdagangan yang ada  Rp. 0,00  Total jumlah jenis perdagangan besar  Rp. 0,00  Total nilai biaya yang dikeluarkan  Rp. 0,00  Total biaya antara lainnya  Rp. 0,00
Total nilai aset perdagangan yang ada  Rp. 0,00  Total jumlah jenis perdagangan besar  Rp. 0,00  Total nilai biaya yang dikeluarkan  Rp. 0,00  Total biaya antara lainnya  Rp. 0,00
Total nilai aset perdagangan yang ada  Rp. 0,00  Total jumlah jenis perdagangan besar  Rp. 0,00  Total nilai biaya yang dikeluarkan  Rp. 0,00  Total biaya antara lainnya  Rp. 0,00
Total jumlah jenis perdagangan besar  Rp. 0,00  Total nilai biaya yang dikeluarkan  Rp. 0,00  Total biaya antara lainnya  Rp. 0,00
Total nilai biaya yang dikeluarkan Rp. 0,00 Total biaya antara lainnya Rp. 0,00
Total biaya antara lainnya Rp. 0,00
I.2. Subsektor Perdagangan Eceran
I.2. Subsektor Perdagangan Eceran
Jumlah total jenis perdagangan eceran 14 jenis
Total nilai transaksi Rp. 10.500.000,00
Total nilai biaya yang dikeluarkan Rp. 8.000.000,00
Total nilai aset perdagangan eceran Rp. 2.500.000,00
11p. 2.000.000,00
I.3. Subsektor Hotel
Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada 0 jenis
Jumlah total pendapatan Rp. 0,00
Jumlah total biaya pemeliharaan Rp. 0,00
, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan Rp. 0,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkanRp. 0,00Jumlah total pendapatan yang diperolehRp. 0,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan       Rp. 0,00         Jumlah total pendapatan yang diperoleh       Rp. 0,00         I.4. Subsektor Restoran       I.4. Subsektor Restoran
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan       Rp. 0,00         Jumlah total pendapatan yang diperoleh       Rp. 0,00         I.4. Subsektor Restoran       Unit
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan Rp. 0,00  Jumlah total pendapatan yang diperoleh Rp. 0,00  I.4. Subsektor Restoran  Jumlah tempat penyediaan konsumsi 0 Unit  Biaya konsumsi yang dikeluarkan Rp. 0,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan       Rp. 0,00         Jumlah total pendapatan yang diperoleh       Rp. 0,00         I.4. Subsektor Restoran       Umlah tempat penyediaan konsumsi
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan Rp. 0,00  Jumlah total pendapatan yang diperoleh Rp. 0,00  I.4. Subsektor Restoran  Jumlah tempat penyediaan konsumsi 0 Unit  Biaya konsumsi yang dikeluarkan Rp. 0,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan Rp. 0,00  Jumlah total pendapatan yang diperoleh Rp. 0,00  I.4. Subsektor Restoran  Jumlah tempat penyediaan konsumsi 0 Unit  Biaya konsumsi yang dikeluarkan Rp. 0,00  Biaya antara lainnya Rp. 0,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan Rp. 0,00  Jumlah total pendapatan yang diperoleh Rp. 0,00  I.4. Subsektor Restoran  Jumlah tempat penyediaan konsumsi 0 Unit  Biaya konsumsi yang dikeluarkan Rp. 0,00  Biaya antara lainnya Rp. 0,00

Jumlah bangunan yang ada tahun ini	0 unit
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Total nilai bangunan yang ada	Rp. 0,00
Biaya antara lainnya	Rp. 0,00
Daya anara aminya	1,5.0,00
K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	
K.1. Subsektor Bank	
	D:: 0.00
Jumlah transaksi perbankan	Rp. 0,00
Jumlah nilai transaksi perbankan	Rp. 0,00
Jumlah biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
KA A La Markatan La constitución	
K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank	0.11.11
Jumlah lembaga keuangan bukan bank	0 Unit
Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank	0 Jenis
Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
K.3. Subsektor Sewa Bangunan	
Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah	0 unit
Total nilai persewaan yang dicapai	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Biaya lainnya	Rp. 0,00
K.4. Subsektor Jasa Perusahaan	
Jumlah perusahaan jasa	0 Jenis
Nilai transaksi perusahaan jasa	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Biaya lainnya	Rp. 0,00
L. SEKTOR JASA-JASA	
L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum	
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	0 unit
	1
Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan	Rp. 0,00
L.2. Subsektor jasa swasta	
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat	0 jenis
Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi	
Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi	0 jenis
Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi	Rp. 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp. 0,00
L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	
Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	0 jenis
Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp 0,00
Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00
M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	
M.1. Subsektor Angkutan	
Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan	
sungai/danau/penyeberangan	2 Jenis
Jumlah total kendaraan angkutan	10 Unit
Nilai total transaksi pengangkutan	Rp 5.600.000,00
Nilai total biaya yang dikeluarkan	Rp 3.000.000,00
	<u> </u>
N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM	
N.1. Subsektor Listrik	
N.1. Subsektor Listrik Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik	0 Jenis
Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik Jumlah nilai produksi listrik	Rp 0,00
N.1. Subsektor Listrik Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik Jumlah nilai produksi listrik Jumlah total nilai transaksi	Rp 0,00 Rp 0,00
N.1. Subsektor Listrik Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik Jumlah nilai produksi listrik	Rp 0,00
N.1. Subsektor Listrik Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik Jumlah nilai produksi listrik Jumlah nilai transaksi	Rp 0,00 Rp 0,00

Jumlah kegiatan penyediaan gas	0 jenis		
Nilai aset produksi gas	Rp 0,00		
Nilai transaksi	Rp 0,00		
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00		
N.3. Subsektor Air Minum			
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum	0 jenis		
Nilai aset penyediaan air minum	Rp 0,00		
Nilai produksi air minum	Rp 0,00		
Nilai transaksi air minum Rp 0,00			
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00		

#### IV. PENDAPATAN PERKAPITA

## A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha

A.1. Pertanian	
1. Jumlah rumah tangga	276 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	609 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	303 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	612 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 200.000,00
A.2. Perkebunan	
1. Jumlah rumah tangga	<b>0</b> Keluarga
Jumlah total anggota rumah tangga	0 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	<b>0</b> Keluarga
Jumlah anggota rumah tangga buruh	0 orang
Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 0,00
3. Julillan pendapatan penapita dan sektor tersebut untuk setiap ruman tangga	Γιρ 0,00
A.3. Peternakan	
1. Jumlah rumah tangga	0 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	0 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	<b>0</b> Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	0 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 0,00
A.4. Perikanan	
1. Jumlah rumah tangga	<b>5</b> Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	<b>15</b> orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	<b>0</b> Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	0 orang
Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 375.000,00
o. outman portacpatan portacpita dan sociol torsobut untak sociap raman tangga	1.000,000
A.P. Manatinan	
A.5. Kerajinan	2161
1. Jumlah rumah tangga	<b>0</b> Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	0 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	<b>0</b> Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	0 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 0,00
A.6. Pertambangan	
1. Jumlah rumah tangga	<b>0</b> Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	0 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	<b>0</b> Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	0 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 0,00
A.7. Industri kecil, menengah dan besar	
	0 Koluaraa
1. Jumlah rumah tangga	0 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	0 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	0 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	<b>0</b> orang
Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 0,00
A.8. Jasa dan perdagangan	
1. Jumlah rumah tangga	<b>0</b> Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	0 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	<b>0</b> Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	0 orang
Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 0,00

		_	
B. PENDAPATAN RILL KELUARGA			
Jumlah Kepala Keluarga		1428 KK	
Jumlah Anggota Keluarga		4213 orang	
nlah Pendapatan Kepala Keluarga		Rp 1.000.000,00	
Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja		Rp 1.500.000,00	
V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR			
1. Sektor Pertanian			
Petani		orang	
Buruh Tani	237 (		
Pemilik Usaha Tani	168 0	orang	
2. Sektor Perkebunan			
Karyawan Perusahaan Perkebunan	0 ora	ina	
Buruh perkebunan	0 ora		
Pemilik usaha Perkebunan	0 ora	ing	
Sektor Peternakan     Peternakan Perorangan	0 ora	ng	
Peternakan Perorangan Buruh Usaha Peternakan	0 ora		
Pemilik Usaha Peternakan	0 ora	-	
4. Sektor Perikanan			
Nelayan	0 ora	·	
Buruh Usaha Perikanan Pemilik Usaha Perikanan	0 ora	-	
Fermin Osana Fernanan	0 014	ing	
5. Sektor Kehutanan			
Pengumpul Hasil Hutan	0 ora	ing	
Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan	0 ora	ing	
Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan	0 ora	ing	
6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C			
Penambang Galian C Perorangan	0 ora	ing	
Buruh Usaha Pertambangan	0 ora		
Pemilik Usaha Pertambangan	0 ora	ing	
7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga			
7. Oektor muustir Keen & Kerajinan Kunian rangga			
8. Sektor Industri Menengah dan Besar			
Karyawan perusahaan swasta	207 (	orang	
Karyawan perusahaan pemerintah	15 or		
Pemilik perusahaan	0 ora	ing	
0. Saktar Bardagangan			
9. Sektor Perdagangan Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	orang	n	
Buruh Perdagangan Hasil Bumi	oran	-	
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	oran	-	
10. Sektor Jasa			
Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	0 ora		
Pemilik usaha informasi dan komunikasi Kontraktor	0 ora		
Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata	0 ora		
Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	0 ora	-	
Pemilik usaha hotel dan penginapan lainnya	0 ora	-	
Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	0 ora		
Pegawai Negeri Sipil	9 ora	-	
TNI	0 ora	<u> </u>	
POLRI	0 ora		
Dokter swasta	0 ora	<u> </u>	
Bidan swasta	0 ora	<u> </u>	
Derewet eweete		ing	
Perawat swasta  Dukun/paranormal/supranatural		ina	
Perawat swasta  Dukun/paranormal/supranatural  Jasa pengobatan alternatif	0 ora 0 ora	<u> </u>	
Dukun/paranormal/supranatural	0 ora	ing	

Pensiunan TNI/POLRI	1 orang
Pensiunan PNS	3 orang
Pensiunan swasta	1 orang
Pengacara	0 orang
Notaris	0 orang
Seniman/artis	1 orang
Pembantu rumah tangga	13 orang
Sopir	37 orang
Buruh migran perempuan	26 orang
Buruh migran laki-laki	8 orang
Usaha jasa pengerah tenaga kerja	1 orang
Wiraswasta lainnya	0 orang
Tidak mempunyai matapencaharian tetap	1056 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta	0 orang
	'

## VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT

A. ASET TANAH	
Tidak memiliki tanah	3110 orang
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha	1103 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha	0 orang
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha	0 orang
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha	0 orang
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha	0 orang
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha	0 orang
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha	0 orang
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha	0 orang
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha	0 orang
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha	0 orang
memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha	0 orang
Memiliki tanah lebih dari 10 ha	0 orang
Jumlah total penduduk	0 orang
B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM	
Memiliki ojek	2 orang- 2 unit
Memiliki becak	1 orang- 1 unit
Memiliki cidemo/andong/dokar	0 orang- 0 unit
Memiliki kapal motor	0 orang- 0 unit
Memiliki bus	0 orang- 0 unit
Memiliki mini bus	18 orang- 21 unit
Memiliki helikopter dan atau pesawat	0 orang- 0 unit
C. ASET SARANA PRODUKSI	
Memiliki penggilingan padi	2 orang
Memiliki traktor	8 orang
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian	2 orang
Memiliki kapal penangkap ikan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil hutan	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas	0 orang
D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING	
RUMAH MENURUT LANTAI	
RUMAH MENURUT ATAP	

# VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA

Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya	1428 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya	1350 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki mobil dansejenisnya	41 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki perahu bermotor	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki kapal barang	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki kapal penumpang	0 Keluarga

Jumlah keluarga memiliki kapal pesiar	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki helikopter	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki pesawat terbang	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki ternak besar	3 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki ternak kecil	221 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki hiasan emas/berlian	652 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki buku tabungan bank	9 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki buku surat berharga	0 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat deposito	0 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat tanah	575 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat bangunan	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki perusahaan industri besar	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki peruahaan industri menengah	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki perusahaan industri kecil	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha perikanan	5 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha peternakan	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha perkebunan	5 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha pasar swalayan	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar swalayan	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar tradisional	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar desa	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha transportasi/pengangkutan	3 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki aset telekomunikasi	0 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki saham di perusahaan	0 Keluarga
	·

# VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT

A. Tingkat Pendidikan Penduduk	
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	40 orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	114 orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	5 orang
Jumlah penduduk sedang SD/sederajat	462 orang
Jumlah penduduk tamat SD/sederajat	915 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat	561 orang
Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat	130 orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat	286 orang
Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat	109 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat	152 orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat	125 orang
Jumlah penduduk sedang D-1	1 orang
Jumlah penduduk tamat D-1	3 orang
Jumlah penduduk sedang D-2	0 orang
Jumlah penduduk tamat D-2	0 orang
Jumlah penduduk sedang D-3	0 orang
Jumlah penduduk tamat D-3	5 orang
Jumlah penduduk sedang S-1	9 orang
Jumlah penduduk tamat S-1	33 orang
Jumlah penduduk sedang S-2	0 orang
Jumlah penduduk tamat S-2	2 orang
Jumlah penduduk tamat S-3	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB A	1 orang
Jumlah penduduk tamat SLB A	1 orang
Jumlah penduduk sedang SLB B	1 orang
Jumlah penduduk tamat SLB B	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB C	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB C	3 orang
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	0 orang
B. Wajib belajar 9 tahun	
1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	481 orang
Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	451 orang
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	6 orang
C. Rasio Guru dan Murid	
Numlah guru TK dan kelompok bermain anak	12 orang
Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak	85 orang
3. Jumlah guru SD dan sederajat	25 orang
4. Jumlah siswa SD dan sederajat	368 orang
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat	6 orang
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat	379 orang
7. Jumlah guru SLTA/sederajat	0 orang
8. Jumlah siswa SLTA/sederajat	105 orang
9. Jumlah siswa SLB	3 orang
10. Jumlah guru SLB	0 orang
To. Garrian gard GED	<sub> </sub> ording

D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat	
Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	1 unit
Jumlah taman bacaan desa/kelurahan	0 unit
Jumlah perpustakaan keliling	0 unit
Jumlah sanggar belajar	0 unit
Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah	0 kegiatan
Jumlah kelompok belajar Paket A	0 kelompok
Jumlah peserta ujian Paket A	0 orang
Jumlah kelompok belajar Paket B	0 kelompok
Jumlah Peserta ujian Paket B	25 orang
Jumlah kelompok belajar Paket C	0 kelompok
Jumlah peserta ujian Paket C	41 orang
Jumlah lembaga kursus keterampilan	0 unit
Jumlah peserta kursus keterampilan	0 orang

# IX. KESEHATAN MASYARAKAT

Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar

A. Kualitas Ibu Hamil	
Jumlah ibu hamil	122 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu	20 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas	14 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit	0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek	2 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek	4 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih	2 orang
Jumlah kematian ibu hamil	0 orang
Jumlah ibu hamil melahirkan	4 orang
Jumlah ibu nifas	2 orang
Jumlah kematian ibu nifas	0 orang
Jumlah ibu nifas hidup	2 orang
B. Kualitas Bayi	
Jumlah keguguran kandungan	0 orang
Jumlah bayi lahir	13 orang
Jumlah bayi lahir mati	0 orang
Jumlah bayi lahir hidup	10 orang
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan	1 orang
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan	0 orang
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg	2 orang
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan	
mental	0 orang
C. Kualitas Persalinan	
Tempat Persalinan	
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum	0 unit
Tempat persalinan Rumah Bersalin	0 unit
Tempat persalinan Puskesmas	0 unit
Tempat persalinan Polindes	0 unit
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak	0 unit
Tempat persalinan rumah praktek bidan	1 unit
Tempat praktek dokter	0 unit
Rumah dukun	0 unit
Rumah sendiri	0 unit
Pertolongan Persalinan	
Jumlah Persalinan ditolong Dokter	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong bidan	8 tindakan
Jumlah persalinan ditolong perawat	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong keluarga	0 tindakan
ournan persamian ditolong kelaanga	0 tilidakan
D. Columna Image land	
D. Cakupan Imunisasi	12 arang
Jumlah Bayi usia 2 bulan	13 orang
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1	13 orang
Jumlah bayi usia 3 bulan	2 orang
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2	2 orang
Jumlah bayi usia 4 bulan	6 orang
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3	6 orang
Jumlah bayi 9 bulan	2 orang
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak	7 orang
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar	0 orang

0 orang

E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB	
Pasangan Usia Subur	
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun	133 orang
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun	864 orang
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun	2 orang
Jumlah pasangan usia subur	664 pasangan
Keluarga Berencana	
Jumlah akseptor KB	0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik	252 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral	189 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom	22 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil	69 orang
Jumlah pengguna metode vasektomi	0 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi	0 orang
Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah	4 orang
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional	0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx	0 orang
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	128 orang
Julilari POS yang tidak menggunakan metode KB	120 orang
F. Wabah Penyakit	
Muntaber	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
Demam berdarah	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
Kolera	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
zaman yang memigga	o Rojadian
Polio	
	0 (-:
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
Cikungunya	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
Flu burung	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
Busung lapar	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
,	
Kelaparan	
	0 kaladian
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
Ispa	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
G. Angka Harapan Hidup	
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan	0,00 Tahun
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota	0,00 Tahun
Angka Harapan Hidup Provinsi	0,00 Tahun
Angka harapan Hidup Nasional	0,00 Tahun
angha narapan maap madonar	o,oo tahan
	000161
1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali	886 Keluarga
Jumlah keluarga menggunakan sumur gali     Jumlah keluarga pelanggan PAM	0 Keluarga
H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih  1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali  2. Jumlah keluarga pelanggan PAM  3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan	0 Keluarga 0 Keluarga
Jumlah keluarga menggunakan sumur gali     Jumlah keluarga pelanggan PAM	0 Keluarga

6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum		0 Keluarga		
		22 Keluarga		
8. Jumlah keluarga menggunakan embung		0 Keluarga		
9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air		198 Keluarga		
10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air	r laut	0 Keluarga		
11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sul		T T		
atas		36 Keluarga		
Total jumlah keluarga		0 Keluarga		
I. Perilaku hidup bersih dan sehat		I		
Kebiasaan buang air besar				
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat		785 Keluarga		
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar keseha	itan	200 Keluarga		
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan		123 Keluarga		
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum		40 Keluarga		
Pola makan				
Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali		Ada		
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali	Ada			
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali		Ada		
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali		Ada		
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali		Tidak		
r ordadak yang bolam tenta sonan makan 1 kan		Hadit		
Kebiasaan berobat bila sakit		1		
Dukun Terlatih		Tidak ada		
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu		Sedikit		
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif		Sedikit		
Paranormal		Tidak ada		
Obat tradisional dari keluarga sendiri		Tidak ada		
Tidak diobati		Tidak ada		
J. Status Gizi Balita				
Jumlah Balita		321 orang		
Jumlah Balita bergizi buruk		1 orang		
Jumlah Balita bergizi baik		305 orang		
Jumlah Balita bergizi kurang		13 orang		
Jumlah Balita bergizi lebih		2 orang		
K I ald Bart % Odiffer and				
K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini				
.lenis nenvakit		Jumlah nend	erita	Di rawat di
Jenis penyakit	1 orang	Jumlah pend	erita	Di rawat di
Jantung	1 orang		erita	Rumah
Jantung Stroke	2 orang	•	erita	Rumah Rumah
Jantung Stroke Diabetes Melitus	2 orang 12 orang	g	erita	Rumah Rumah Rumah sakit
Jantung Stroke Diabetes Melitus Gila/stress	2 orang 12 orang 4 orang	g	erita	Rumah Rumah Rumah sakit Rumah
Jantung Stroke Diabetes Melitus Gila/stress TBC	2 orang 12 orang 4 orang 4 orang	g	erita	Rumah Rumah sakit Rumah Rumah
Jantung Stroke Diabetes Melitus Gila/stress TBC	2 orang 12 orang 4 orang	g	erita	Rumah Rumah Rumah sakit Rumah
Jantung Stroke Diabetes Melitus Gila/stress TBC Asma  L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat	2 orang 12 orang 4 orang 4 orang	g		Rumah Rumah sakit Rumah Rumah
Jantung Stroke Diabetes Melitus Gila/stress TBC Asma  L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum	2 orang 12 orang 4 orang 4 orang	g	8 unit	Rumah Rumah sakit Rumah Rumah
Jantung Stroke Diabetes Melitus Gila/stress TBC Asma  L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu	2 orang 12 orang 4 orang 4 orang	g	8 unit 6 unit	Rumah Rumah sakit Rumah Rumah
Jantung Stroke Diabetes Melitus Gila/stress TBC Asma  L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah kader Posyandu aktif	2 orang 12 orang 4 orang 4 orang	g	8 unit 6 unit 30 orang	Rumah Rumah sakit Rumah Rumah
Jantung Stroke Diabetes Melitus Gila/stress TBC Asma  L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah kader Posyandu aktif Jumlah pembina Posyandu	2 orang 12 orang 4 orang 4 orang	g	8 unit 6 unit 30 orang 3 orang	Rumah Rumah sakit Rumah Rumah
Jantung Stroke Diabetes Melitus Gila/stress TBC Asma  L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah kader Posyandu aktif Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma	2 orang 12 orang 4 orang 4 orang	g	8 unit 6 unit 30 orang 3 orang 8 Dasawisma	Rumah Rumah sakit Rumah Rumah
Jantung Stroke Diabetes Melitus Gila/stress TBC Asma  L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah kader Posyandu aktif Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif	2 orang 12 orang 4 orang 4 orang	g	8 unit 6 unit 30 orang 3 orang 8 Dasawisma 8 orang	Rumah Rumah sakit Rumah Rumah
Jantung Stroke Diabetes Melitus Gila/stress TBC Asma  L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah kader Posyandu aktif Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif	2 orang 12 orang 4 orang 4 orang	g	8 unit 6 unit 30 orang 3 orang 8 Dasawisma 8 orang 30 orang	Rumah Rumah sakit Rumah Rumah
Jantung Stroke Diabetes Melitus Gila/stress TBC Asma  L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah kader Posyandu aktif Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif	2 orang 12 orang 4 orang 4 orang	g	8 unit 6 unit 30 orang 3 orang 8 Dasawisma 8 orang 30 orang 1 orang	Rumah Rumah sakit Rumah Rumah
Jantung Stroke Diabetes Melitus Gila/stress TBC Asma  L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu	2 orang 12 orang 4 orang 4 orang	g	8 unit 6 unit 30 orang 3 orang 8 Dasawisma 8 orang 30 orang 1 orang Diisi	Rumah Rumah sakit Rumah Rumah
Jantung Stroke Diabetes Melitus Gila/stress TBC Asma  L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu	2 orang 12 orang 4 orang 4 orang	g	8 unit 6 unit 30 orang 3 orang 8 Dasawisma 8 orang 30 orang 1 orang Diisi Diisi	Rumah Rumah sakit Rumah Rumah
Jantung Stroke Diabetes Melitus Gila/stress TBC Asma  L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu	2 orang 12 orang 4 orang 4 orang	g	8 unit 6 unit 30 orang 3 orang 8 Dasawisma 8 orang 30 orang 1 orang Diisi Diisi	Rumah Rumah sakit Rumah Rumah
Jantung Stroke Diabetes Melitus Gila/stress TBC Asma  L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku administrasi Posyandu lainnya	2 orang 12 orang 4 orang 4 orang	g	8 unit 6 unit 30 orang 3 orang 8 Dasawisma 8 orang 1 orang Diisi Diisi 14 jenis	Rumah Rumah sakit Rumah Rumah
Jantung Stroke Diabetes Melitus Gila/stress TBC Asma  L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku administrasi Posyandu lainnya Jumlah kegiatan Posyandu	2 orang 12 orang 4 orang 4 orang	g	8 unit 6 unit 30 orang 3 orang 8 Dasawisma 8 orang 10 orang Diisi Diisi Diisi 14 jenis 20 jenis	Rumah Rumah sakit Rumah Rumah
Jantung Stroke Diabetes Melitus Gila/stress TBC Asma  L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku kegiatan Posyandu Buku administrasi Posyandu Buku administrasi Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu	2 orang 12 orang 4 orang 4 orang	g	8 unit 6 unit 30 orang 3 orang 8 Dasawisma 8 orang 10 orang Diisi Diisi Diisi 14 jenis 20 jenis 16 orang	Rumah Rumah sakit Rumah Rumah
Jantung Stroke Diabetes Melitus Gila/stress TBC Asma  L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku kegiatan Posyandu Buku administrasi Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu	2 orang 12 orang 4 orang 4 orang	g	8 unit 6 unit 30 orang 3 orang 8 Dasawisma 8 orang 10 orang Diisi Diisi Diisi 14 jenis 20 jenis 16 orang	Rumah Rumah sakit Rumah Rumah
Jantung Stroke Diabetes Melitus Gila/stress TBC Asma  L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku kegiatan Posyandu Buku administrasi Posyandu Buku administrasi Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu	2 orang 12 orang 4 orang 4 orang	g	8 unit 6 unit 30 orang 3 orang 8 Dasawisma 8 orang 10 orang Diisi Diisi Diisi 14 jenis 20 jenis 16 orang 9 jenis 0 jenis	Rumah Rumah sakit Rumah Rumah
Jantung Stroke Diabetes Melitus Gila/stress TBC Asma  L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku administrasi Posyandu Buku administrasi Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan pengobatan gratis Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan	2 orang 12 orang 4 orang 4 orang	g	8 unit 6 unit 30 orang 3 orang 8 Dasawisma 8 orang 10 orang Diisi Diisi Diisi 20 jenis 16 orang 9 jenis 0 jenis 4 jenis	Rumah Rumah sakit Rumah Rumah
Jantung Stroke Diabetes Melitus Gila/stress TBC Asma  L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku kegiatan Posyandu Buku kegiatan Posyandu Buku kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu	2 orang 12 orang 4 orang 4 orang	g	8 unit 6 unit 30 orang 3 orang 8 Dasawisma 8 orang 10 orang Diisi Diisi Diisi 14 jenis 20 jenis 16 orang 9 jenis 0 jenis	Rumah Rumah sakit Rumah Rumah
Jantung Stroke Diabetes Melitus Gila/stress TBC Asma  L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan	2 orang 12 orang 4 orang 4 orang	g	8 unit 6 unit 30 orang 3 orang 8 Dasawisma 8 orang 10 orang Diisi Diisi Diisi 20 jenis 16 orang 9 jenis 0 jenis 4 jenis	Rumah Rumah Rumah sakit Rumah Rumah

0 kasus

A. Konflik SARA Kasus konflik pada tahun ini

Kasus konflik SARA pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga	0 kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW	0 kasus
Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli	0 kasus
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain	0 kasus
Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah	0 kasus
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	Rp 0,00
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah	0 orang
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan	0 orang
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan	0 orang
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	0 orang
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	0 kasus
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	0 orang
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	Rp 0,00
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	0 buah
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	0 rumah
Jumlah korban luka akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah janda akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah anak yatim akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
B. Perkelahian	
Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material	0 kasus
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
C. Pencurian	
Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini	0 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api	0 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah	
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk	0 kasus
setempat Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya	
penduduk setempat	0 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan	
Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi	orang
Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini	orang
Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan	orang
Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang	orang
F. Pemakaian Miras dan Narkoba	
F. Pemakaian Miras dan Narkoba	0 buah
F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras	
F. Pemakaian Miras dan Narkoba	0 buah 0 orang 0 kasus
F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras	0 orang
F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah kasus mabuk akibat Miras	0 orang 0 kasus
F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah kasus mabuk akibat Miras Jumlah pengedar Narkoba	0 orang 0 kasus 0 orang
F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah kasus mabuk akibat Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba	0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang
F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah kasus mabuk akibat Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 kasus
F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah kasus mabuk akibat Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba	0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 tasus 0 kasus 0 kasus
F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah kasus mabuk akibat Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 tasus 0 kasus 0 kasus 0 orang
F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah kasus mabuk akibat Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 tasus 0 kasus 0 kasus 0 orang
F. Pemakaian Miras dan Narkoba  Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras  Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras  Jumlah kasus mabuk akibat Miras  Jumlah pengedar Narkoba  Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba  Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba  Jumlah kasus kematian akibat Narkoba  Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum  Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang 0 kasus 0 orang 0 orang 0 tasus 0 kasus 0 kasus 0 orang
F. Pemakaian Miras dan Narkoba  Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras  Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras  Jumlah kasus mabuk akibat Miras  Jumlah pengedar Narkoba  Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba  Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba  Jumlah kasus kematian akibat Narkoba  Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum  Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum  G. Prostitusi  Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat  Lokalisasi prostitusi	0 orang 0 kasus 0 orang 0 sasus 0 orang 0 kasus 0 kasus 0 orang 0 orang Tidak Ada
F. Pemakaian Miras dan Narkoba  Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras  Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras  Jumlah kasus mabuk akibat Miras  Jumlah pengedar Narkoba  Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba  Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba  Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba  Jumlah kasus kematian akibat Narkoba  Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum  Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum  G. Prostitusi  Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat  Lokalisasi prostitusi  Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)	0 orang 0 kasus 0 orang 0 sasus 0 orang 0 kasus 0 kasus 0 orang 0 orang Tidak Ada 0 buah
F. Pemakaian Miras dan Narkoba  Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras  Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras  Jumlah kasus mabuk akibat Miras  Jumlah pengedar Narkoba  Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba  Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba  Jumlah kasus kematian akibat Narkoba  Jumlah kasus kematian akibat Narkoba  Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum  Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum  G. Prostitusi  Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat  Lokalisasi prostitusi  Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)  Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi	0 orang 0 kasus 0 orang 0 sasus 0 orang 0 kasus 0 kasus 0 orang 0 orang Tidak Ada 0 buah 0 kasus
F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum  G. Prostitusi Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll) Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi Jumlah pembinaan pelaku prostitusi	0 orang 0 kasus 0 orang 0 sang 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang Tidak Ada 0 buah 0 kasus 0 kasus
F. Pemakaian Miras dan Narkoba  Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras  Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras  Jumlah kasus mabuk akibat Miras  Jumlah pengedar Narkoba  Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba  Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba  Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba  Jumlah kasus kematian akibat Narkoba  Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum  Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum  G. Prostitusi  Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat  Lokalisasi prostitusi  Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)  Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi	0 orang 0 kasus 0 orang 0 sasus 0 orang 0 kasus 0 kasus 0 orang 0 orang Tidak Ada 0 buah 0 kasus
F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum  G. Prostitusi Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll) Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi Jumlah pembinaan pelaku prostitusi	0 orang 0 kasus 0 orang 0 sang 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang Tidak Ada 0 buah 0 kasus 0 kasus
F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum  G. Prostitusi Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll) Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi Jumlah pembinaan pelaku prostitusi	0 orang 0 kasus 0 orang 0 sang 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang Tidak Ada 0 buah 0 kasus 0 kasus
F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum  G. Prostitusi Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll) Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi Jumlah pembinaan pelaku prostitusi Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi	0 orang 0 kasus 0 orang 0 sang 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 orang 0 orang 0 orang Tidak Ada 0 buah 0 kasus 0 kasus
F. Pemakaian Miras dan Narkoba Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras Jumlah pengedar Narkoba Jumlah pengedar Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba Jumlah kasus kematian akibat Narkoba Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum  G. Prostitusi Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat Lokalisasi prostitusi Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll) Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi Jumlah pembinaan pelaku prostitusi Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi	0 orang 0 kasus 0 orang 0 sasus 0 orang 0 kasus 0 kasus 0 orang 0 orang Tidak Ada 0 buah 0 kasus 0 kasus

	1
Jumlah kasus bunuh diri	0 kasus
Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum	0 kasus
I. Penculikan	
Jumlah kasus penculikan	0 kasus
Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum	0 kasus
J. Kejahatan seksual	
Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat	0 kasus 0 kasus
Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks	0 kasus 0 unit
bumlan tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks	o driit
K. Masalah Kesejahteraan Sosial	
Jumlah gelandangan	orang
Jumlah pengemis jalanan	orang
Jumlah anak jalanan dan terlantar	orang
Jumlah manusia lanjut usia terlantar	orang
Jumlah orang gila/stress/cacat mental	orang
Jumlah orang cacat fisik	orang
Jumlah orang kelainan kulit	orang
Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan	orang
Jumlah rumah dan kawasan kumuh Jumlah panti jompo	unit
Jumlah panti asuhan anak	unit
Jumlah rumah singgah anak jalanan	unit
Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota	orang
Jumlah penghuni bantaran sungai	orang
Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api	orang
Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya	orang
Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif	orang
Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun	orang
Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun	orang
Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun	orang
Jumlah janda Jumlah duda	orang orang
Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran	orang
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/sederajat	orang
Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat	orang
Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/sederajat	orang
Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang	orang
Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga	orang
Jumlah penduduk eks NAPI	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringan	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan	orang
Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus	orang
Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh	orang
Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman	orang
wanya penuatang uan atau perenja musiman	orang
L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1
Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri	kasus
Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami	kasus
Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak	kasus
Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua	kasus
Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya	kasus
M. Teror dan Intimidasi	
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan	kasus
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan	kasus
Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk	kasus
Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini	kasus

Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat	kasus
Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal	kasus
N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta	
Organisasi Siskamling	
Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat	
Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamlimg/Pos Ronda	RT
Jumlah anggota Hansip dan Linmas	orang
Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda	
Buku anggota Hansip dan Linmas	jenis
Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta	unit
Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah	kegiatan
Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan	Pos
	ı
XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT	

A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara	I
	0 jenis
	0 kegiatan
, , , ,	0 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	0 kegiatan
Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	0 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	0 kegiatan
Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri	0 kasus
Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi	0 orang
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi	0 orang
Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga	0 kasus
Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini	0 kasus
Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan	0 kasus
Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara	0 kasus
Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini	0 kasus
Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.	0 kasus
Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya	0 kasus
Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah	0 kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain	0 kasus
B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi	
Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan	1 jenis
	2285 orang
· ·	Rp 68.043.435,00
·	90,00 %
Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB	1 tindakan
11 00	0 jenis
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0 orang
Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	Rp 0.00
	0,00 %
Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan	0 jenis
1 0	,
	Rp 0,00 0,00 %
	*
	0 kasus
Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar	0 kasus
C. Partisipasi Politik	
1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum	
	3154 orang
. , , , .	2540 orang
	0 orang
	5 partai
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 partai
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan	5 orang
	0 orang
	2540 pemilih
punian peniiin yang menggunakan nak pilin dalam penilinan presidenwakii	ZOHO PEHIIIII

2. Pemilihan Kepala Daerah  Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih	3154 orang
Jumlah penilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu	2540 pemilih
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubenur yang lalu	2540 pemilih
Julian permin yang menggunakan nak pilin dalam permid dabendi yang lalu	2040 portinin
3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan	
Penentuan Jabatan Kepala Desa	Dipilih masyarakat secara langsung
Penentuan Sekretaris Desa	Diusulkan oleh Kepala Desa, Dipilih, Diangkat dan Ditetapkan oleh Bupati/Walikota
Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun	Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta disahkan Camat
Masa jabatan Kepala Desa	6 tahun
Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan	
renentuan Japatan Lulan dan Ferangkat Kelulahan terhasuk Kepala Lingkungan	
4. Pemilihan BPD	
Jumlah anggota BPD	5 orang
Penentuan anggota BPD	Dipilih masyarakat secara langsung
Pimpinan BPD	Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung
Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	Ada
Anggaran untuk BPD	Ada
	Peraturan Desa 1 buah     Permintaan keterangan dari Kepala Desa 0 kali     Rancangan Peraturan Desa. 0 buah     Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kal
Produk keputusan BPD tahun ini	Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali     Menyampaikan usul dan pendapat
	kepada Kepala Desa 0 kali  7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan
	APB Desa 0 kali
5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan	A .l -
Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Ada
Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD	Keputusan Kepala Desa
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan	100 unit organisasi
<del></del>	Keputusan Lurah
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK	
·	0 unit organisasi
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan	Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan Pemilihan pengurus LKD/LKK Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K,	
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan Pemilihan pengurus LKD/LKK Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya	Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah Ditunjuk dan diangkat oleh Ketua LKD/LK
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan  Pemilihan pengurus LKD/LKK  Pemilihan pengurus organisasi anggota  LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K,  Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya  Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK	Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah  Ditunjuk dan diangkat oleh Ketua LKD/Lk  Aktif
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan  Pemilihan pengurus LKD/LKK  Pemilihan pengurus organisasi anggota  LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K,  Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya  Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK  Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK	Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah Ditunjuk dan diangkat oleh Ketua LKD/LK
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan  Pemilihan pengurus LKD/LKK  Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K,  Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK  Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK  Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi	Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah  Ditunjuk dan diangkat oleh Ketua LKD/Lk  Aktif
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan  Pemilihan pengurus LKD/LKK  Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K,  Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK  Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK  Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah  Ditunjuk dan diangkat oleh Ketua LKD/Lk  Aktif
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan  Pemilihan pengurus LKD/LKK  Pemilihan pengurus organisasi anggota  LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K,  Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya  Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK  Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK  Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi  anggota LKD/LKK  Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah  Ditunjuk dan diangkat oleh Ketua LKD/Lk  Aktif 0 kegiatan
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan  Pemilihan pengurus LKD/LKK  Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K,  Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK  Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK  Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK  Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK  Alokasi anggaran untuk LKD/LKK  Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya	Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah  Ditunjuk dan diangkat oleh Ketua LKD/Lk  Aktif 0 kegiatan  0 kegiatan
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan  Pemilihan pengurus LKD/LKK  Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK Alokasi anggaran untuk LKD/LKK Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK	Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah  Ditunjuk dan diangkat oleh Ketua LKD/Lk  Aktif 0 kegiatan  0 kegiatan
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan  Pemilihan pengurus LKD/LKK  Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK Alokasi anggaran untuk LKD/LKK Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran	Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah  Ditunjuk dan diangkat oleh Ketua LKD/Lk  Aktif 0 kegiatan  0 kegiatan
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan  Pemilihan pengurus LKD/LKK  Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K,  Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK  Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK  Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK  Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK  Alokasi anggaran untuk LKD/LKK  Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya  Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK  Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD	Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah  Ditunjuk dan diangkat oleh Ketua LKD/Lk  Aktif 0 kegiatan  0 kegiatan  Tidak
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan  Pemilihan pengurus LKD/LKK  Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK  Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK  Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK  Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK  Alokasi anggaran untuk LKD/LKK  Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya  Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK  Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD  Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK  Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK	Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah  Ditunjuk dan diangkat oleh Ketua LKD/Lk  Aktif 0 kegiatan  0 kegiatan
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan  Pemilihan pengurus LKD/LKK  Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK Alokasi anggaran untuk LKD/LKK Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi,	Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah  Ditunjuk dan diangkat oleh Ketua LKD/Lk  Aktif 0 kegiatan  0 kegiatan  Tidak
Pemilihan pengurus LKD/LKK  Pemilihan pengurus UKD/LKK  Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK Alokasi anggaran untuk LKD/LKK Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK	Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah  Ditunjuk dan diangkat oleh Ketua LKD/Lk  Aktif 0 kegiatan  0 kegiatan  Tidak

Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan	4 kali
Justin dan ingkungan Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan	100,00 %
Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan	70,00 %
lumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan	30,00 %
lumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan	1,00 %
Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif	Ya
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan	
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif	Ya
Jsulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	1,00 %
Jsulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB- Desa Jsulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat	1,00 %
usulah rencaha kerja program dan kegiatan dan pemeriman kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibanas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	1,00 %
Jsulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel	0 kegiatan
Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)	Ada
Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)	Ada
Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan	Ada
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi	12 . kegiatan
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan nasil Musrenbang	12 . kegiatan
Demonstrate management delay Deleter construction Deleter construction and the construction of the constru	
2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan	100.00.0/
lumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang lumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah	175,00 %
desa/kelurahan atau kabupaten/kota Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketetapan dalam APB-Desa	1 kegiatan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah	0 kegiatan
lumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang	0,00 %
Jsulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	1,00 %
Jsulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan  Jsulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat	1,00 %
Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat  Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang	1,00 %
sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh	Ada
pelaksana sebelumnya.  Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga	Ada
kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah	0 kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum	0 kasus 0 kasus
Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan	0 Jenis
renis kegiatan masyarakat untuk melestankan nasii pembangunan yang ukobi unasikan pemelintah desarkelurahan	
lumlah kegiatan yang didapai dari APR Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan	
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	3 kegiatan
lumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota	0 kegiatan
lumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota lumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi	<del> </del>
umlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota lumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi lumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN	0 kegiatan 4 kegiatan
lumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota lumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi lumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN  8. Semangat Kegotongroyongan Penduduk	0 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan
umlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota umlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi umlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN  S. Semangat Kegotongroyongan Penduduk umlah kelompok arisan	0 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan 6 buah
umlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota lumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi lumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN  5. Semangat Kegotongroyongan Penduduk lumlah kelompok arisan lumlah penduduk menjadi orang tua asuh	0 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan 6 buah 0 orang
umlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota lumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi lumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN  S. Semangat Kegotongroyongan Penduduk lumlah kelompok arisan lumlah penduduk menjadi orang tua asuh kada tidaknya dana sehat	0 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan 6 buah 0 orang Tidak
umlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota umlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi umlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN  5. Semangat Kegotongroyongan Penduduk umlah kelompok arisan umlah penduduk menjadi orang tua asuh kda tidaknya dana sehat kda tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah	0 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan 6 buah 0 orang Tidak Ada
tumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota tumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi tumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN  S. Semangat Kegotongroyongan Penduduk tumlah kelompok arisan tumlah penduduk menjadi orang tua asuh tada tidaknya dana sehat tada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah tada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah	0 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan 6 buah 0 orang Tidak Ada Tidak
dumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota dumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi dumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN  8. Semangat Kegotongroyongan Penduduk dumlah kelompok arisan dumlah penduduk menjadi orang tua asuh Ada tidaknya dana sehat Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan fasilitas umum dan fasilitas	0 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan 6 buah 0 orang Tidak Ada
tumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota tumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi tumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN  S. Semangat Kegotongroyongan Penduduk tumlah kelompok arisan tumlah penduduk menjadi orang tua asuh kada tidaknya dana sehat kada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah kada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus kada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus kada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas kada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas	0 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan 6 buah 0 orang Tidak Ada Tidak Tidak
tumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota tumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi tumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN  S. Semangat Kegotongroyongan Penduduk tumlah kelompok arisan tumlah penduduk menjadi orang tua asuh tada tidaknya dana sehat tada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah tada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus tada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus tada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas tada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas tada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas	0 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan 6 buah 0 orang Tidak Ada Tidak Tidak Ada
tumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota tumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi tumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN  S. Semangat Kegotongroyongan Penduduk tumlah kelompok arisan tumlah penduduk menjadi orang tua asuh tumlah penduduk menjadi orang tua asuh tuda tidaknya dana sehat tuda tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah tuda tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah tuda tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus tuda tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas tudaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas tudaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha tuda tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha	0 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan 6 buah 0 orang Tidak Ada Tidak Tidak Ada Tidak Tidak
tumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota tumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi tumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN  8. Semangat Kegotongroyongan Penduduk tumlah kelompok arisan tumlah penduduk menjadi orang tua asuh tada tidaknya dana sehat tada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah tada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah tada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus tada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas tada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha tada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha tada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya	0 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan 6 buah 0 orang Tidak Ada Tidak Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
tumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota tumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi tumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN  8. Semangat Kegotongroyongan Penduduk tumlah kelompok arisan tumlah penduduk menjadi orang tua asuh tuda tidaknya dana sehat tuda tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah tuda tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus tudaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus tudaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas tudaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha tudaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha tudaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun tudaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya tudaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan	0 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan 6 buah 0 orang Tidak Ada Tidak Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak
tumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota tumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi tumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN  S. Semangat Kegotongroyongan Penduduk tumlah kelompok arisan tumlah penduduk menjadi orang tua asuh kada tidaknya dana sehat kada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah kada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah kada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus kada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas kada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha kada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun kada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya kada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya kada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan kada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan kada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian	0 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan 6 buah 0 orang Tidak Ada Tidak Tidak Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN  B. Semangat Kegotongroyongan Penduduk Jumlah kelompok arisan Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh Ada tidaknya dana sehat Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas Sosial/prasarana dan sarana Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya	0 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan 6 buah 0 orang Tidak Ada Tidak Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN  8. Semangat Kegotongroyongan Penduduk Jumlah kelompok arisan Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh Ada tidaknya dana sehat Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan usaha peternakan lainnya Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan Ada tidaknya kegiatan gotong royong menbangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan	0 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan 0 orang Tidak Ada Tidak Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBN  B. Semangat Kegotongroyongan Penduduk Jumlah kelompok arisan Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemperjaan sawah dan kebun Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan ingkungan lainnya	0 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan 0 orang Tidak Ada Tidak Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN  8. Semangat Kegotongroyongan Penduduk Jumlah kelompok arisan Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam periatiwa kematian Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi	0 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan 0 orang Tidak Ada Tidak Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Adat istiadat dalam upacara kematian	Pernah Ada
Adat istiadat dalam pengelolaan hutan	Tidak
Adat istiadat dalam tanah pertanian	Tidak
Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai	Tidak
Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga	Tidak
Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam	Tidak
·	
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya	Tidak
Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar	Tidak
5. Sikap Dan Mental Masyarakat	
Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan	0 jenis
Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar	0 jenis
	•
Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah	0
Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah	0
Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal	0
Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga	0 jenis
Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga	0 jenis
Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga	0 jenis
	o jenis
Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan	0 kasus
sejenisnya.	0 keeus
Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam	0
proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan	<u> </u>
Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan	1
Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat	0
Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri	1
Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok	
kepentingan lain	0
keperiurigan iain	
Etos Kerja Penduduk	
Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas	0
Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi	0
Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan	0
Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan	0
· · · · ·	-
Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain	0
Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain	0
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota	1
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya	1
Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak	1
Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada	_
saat kelaparan dan kekeringan	0
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan	
pangan/kelaparan/gagal panen	0
	n
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu	0
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah	0
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan	0
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan	0 0 2
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan	0
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan	0 0 2 0
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya	0 0 2
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi	0 0 2 0
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat	0 0 2 0
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat  XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN	0 0 2 0
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat  XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN	0 0 2 0 0 0
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat  XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	0 0 2 0 0
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat  XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN	0 0 2 0 0 0
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat  XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	0 0 2 0 0
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat  XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan	0 0 2 0 0
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat  XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan  B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN	0 0 2 0 0 0 Tidak Jenis
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat  XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan  B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN 1. Posyandu	0 0 0 2 0 0 Tidak Jenis
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat  XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan  B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN 1. Posyandu Kepengurusan	Tidak Jenis  Ada Ada dan Aktif
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat  XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan  B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN 1. Posyandu Kepengurusan Buku Administrasi	Tidak Jenis  Ada Ada dan Aktif
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat  XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan  B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN 1. Posyandu Kepengurusan	Tidak Jenis  Ada Ada dan Aktif
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat  XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan  B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN 1. Posyandu Kepengurusan Buku Administrasi	Tidak Jenis  Ada Ada dan Aktif
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat  XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan  B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN 1. Posyandu Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan	Tidak Jenis  Ada Ada dan Aktif
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat  XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan  B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN 1. Posyandu Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan  2. Kelompok Tani/Nelayan	Tidak Jenis  Ada Ada dan Aktif 6 6 Jenis  Ada
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat  XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan  B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN 1. Posyandu Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan  2. Kelompok Tani/Nelayan Kepengurusan	Tidak Jenis  Ada Ada dan Aktif 6 6 Jenis  Ada Ada dan Aktif
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat permusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat  XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan  B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN 1. Posyandu Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan  2. Kelompok Tani/Nelayan Kepengurusan Buku Administrasi	Tidak Jenis  Ada Ada dan Aktif 6 6 Jenis  Ada Ada dan Aktif 1
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat  XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan  B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN 1. Posyandu Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan  2. Kelompok Tani/Nelayan Kepengurusan	Tidak Jenis  Ada Ada dan Aktif 6 6 Jenis  Ada Ada dan Aktif
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat permusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat  XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan  B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN 1. Posyandu Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan  2. Kelompok Tani/Nelayan Kepengurusan Buku Administrasi	Tidak Jenis  Ada Ada dan Aktif 6 6 Jenis  Ada Ada dan Aktif 1
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat  XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan  B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN 1. Posyandu Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan  2. Kelompok Tani/Nelayan Kepengurusan Buku Administrasi	Tidak Jenis  Ada Ada dan Aktif 6 6 Jenis  Ada Ada dan Aktif 1
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat  XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan  B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN 1. Posyandu Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan  2. Kelompok Tani/Nelayan Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan	Tidak Jenis  Ada Ada dan Aktif 6 6 Jenis  Ada Ada dan Aktif 1 3 Jenis
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat  XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK  Jumlah kegiatan  B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN 1. Posyandu Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan  2. Kelompok Tani/Nelayan Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan  3. Rukun Tetangga (RT) Kepengurusan	Tidak Jenis  Ada Ada dan Aktif 6 6 Jenis  Ada Ada dan Aktif 1 3 Jenis
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat  XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan  B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN 1. Posyandu Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan  2. Kelompok Tani/Nelayan Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan  3. Rukun Tetangga (RT) Kepengurusan Buku Administrasi	O O O O Tidak Jenis  Ada Ada dan Aktif G G Jenis  Ada Ada dan Aktif 1 3 Jenis  Ada Ada dan Aktif 1 1 3 Jenis
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat  XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK  Jumlah kegiatan  B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN 1. Posyandu Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan  2. Kelompok Tani/Nelayan Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan  3. Rukun Tetangga (RT) Kepengurusan	O O O O O Tidak Jenis  Ada Ada dan Aktif G G Jenis  Ada Ada dan Aktif 1 3 Jenis  Ada Ada dan Aktif

Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
AKUT
Aktif
Aktif
Aktif
_

## XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan	
Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini	Rp 1.905.110.323,00
Sumber Anggaran	
APBD Kabupaten/Kota	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 141.009.252,00
Bantuan Pemerintah Provinsi	Rp 130.000.000,00
Bantuan Pemerintah Pusat	Rp 992.204.000,00
Pendapatan Asli Desa	Rp 30.000.000,00
Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 0,00
Alokasi Dana Desa	Rp 610.527.200,00
Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan	Rp 0,00
Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat	Rp 1.369.871,00
Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan	Rp 1.516.625.661,00
Jumlah Belanja Aparatur/pegawai	Rp 382.314.400,00
B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah	
Penyampaian laporan keterangan pertanggungan jawab Kepala Desa kepada BPD	1
Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan	12 jenis
kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat	12 jenis
Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa	1
Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota	1
Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat	5 jenis
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah	
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah	0 kasus
C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	
1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN	
Gedung Kantor	Ada - Baik
Jumlah ruang kerja	5 Ruang
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya	Ada
Listrik	Ada
Air bersih	Ada
Telepon	Tidak Ada
1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor	
Jumlah mesin tik	1 buah
Jumlah meja	11 buah

Jumlah kursi Jumlah almari arsip	109 buah
	6 buah
Komputer	4 unit
Mesin fax	0 unit
Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa	3 unit
Rendariani Dinas Edian/Repara Desa	3 driit
4. D. Administraci Demonintation Describenta	
1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	Adadas Tasiai
Buku Data Peraturan Desa	Ada dan Terisi
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah	Ada dan Terisi
Buku Administrasi Kependudukan	Ada dan Tidak Terisi
Buku Data Inventaris	Ada dan Terisi
Buku Data Aparat	Ada dan Terisi
Buku Data Tanah Kas Desa	Ada dan Terisi
Buku Administrasi Pajak dan Retribusi	Ada dan Terisi
Buku Data Tanah	Ada dan Terisi
Buku Laporan Pengaduan Masyarakat	Ada dan Tidak Terisi
Buku Agenda Ekspedisi	Ada dan Terisi
Buku Profil Desa dan Kelurahan	Ada dan Terisi
Buku Data Induk Penduduk	Ada dan Terisi
Buku Data Mutasi Penduduk	Ada dan Terisi
Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan	Ada dan Terisi
Buku Registrasi Pelayanan Penduduk	Ada dan Terisi
Buku Data Penduduk Sementara	Ada dan Terisi
Buku Anggaran Penerimaan	Ada dan Terisi
Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan	Ada dan Terisi
Buku Kas Umum	Ada dan Terisi
Buku Kas Pembantu Penerimaan	Ada dan Terisi
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan	Ada dan Terisi
Buku Data Lembaga Kemasyarakatan	Ada dan Terisi
2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD	
Gedung Kantor	0
·	0 Ruang
Balai BPD	0 - 0
Listrik	0
Air bersih	0
Telepon	0
Telepon	
2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor	
	O huah
Jumlah mesin tik Jumlah meja	0 buah
	0 buah 0 buah
	U buan
	Λ LL
<u> </u>	0 buah
Komputer	0 unit
<u> </u>	
Komputer Mesin fax	0 unit
Komputer Mesin fax  2.B. Administrasi BPD	0 unit 0 unit
Komputer Mesin fax  2.B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD	0 unit 0 unit 1
Komputer Mesin fax  2.B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD Buku Buku Administrasi Keanggotaan	0 unit 0 unit
Komputer Mesin fax  2.B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD Buku Buku Administrasi Keanggotaan Buku kegiatan BPD	0 unit 0 unit 1
Komputer Mesin fax  2.B. Administrasi BPD  Buku-buku administrasi kegiatan BPD  Buku Buku Administrasi Keanggotaan  Buku kegiatan BPD  Buku himpunan peraturan desa	0 unit 0 unit 1 2 1 1
Komputer Mesin fax  2.B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD Buku Buku Administrasi Keanggotaan Buku kegiatan BPD	0 unit 0 unit 1
Komputer Mesin fax  2.B. Administrasi BPD  Buku-buku administrasi kegiatan BPD  Buku Buku Administrasi Keanggotaan  Buku kegiatan BPD  Buku himpunan peraturan desa	0 unit 0 unit 1 2 1 1
Komputer Mesin fax  2.B. Administrasi BPD  Buku-buku administrasi kegiatan BPD  Buku Buku Administrasi Keanggotaan  Buku kegiatan BPD  Buku himpunan peraturan desa	0 unit 0 unit 1 2 1 1
Komputer Mesin fax  2.B. Administrasi BPD  Buku-buku administrasi kegiatan BPD  Buku Buku Administrasi Keanggotaan  Buku kegiatan BPD  Buku himpunan peraturan desa  Buku Lainnya	0 unit 0 unit 1 2 1 1
Komputer Mesin fax  2.B. Administrasi BPD  Buku-buku administrasi kegiatan BPD  Buku Buku Administrasi Keanggotaan  Buku kegiatan BPD  Buku himpunan peraturan desa  Buku Lainnya  3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN	0 unit 0 unit 1 2 1 1 0
Komputer Mesin fax  2.B. Administrasi BPD  Buku-buku administrasi kegiatan BPD  Buku Buku Administrasi Keanggotaan  Buku kegiatan BPD  Buku himpunan peraturan desa  Buku Lainnya  3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN  Gedung kantor atau Balai Pertemuan	0 unit 0 unit 1 2 1 1 0 0
Komputer Mesin fax  2.B. Administrasi BPD  Buku-buku administrasi kegiatan BPD  Buku Buku Administrasi Keanggotaan  Buku kegiatan BPD  Buku himpunan peraturan desa  Buku Lainnya  3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN  Gedung kantor atau Balai Pertemuan  Alat tulis kantor	0 unit 0 unit 1 2 1 1 0 0 0 0
Komputer  Mesin fax  2.B. Administrasi BPD  Buku-buku administrasi kegiatan BPD  Buku Buku Administrasi Keanggotaan  Buku kegiatan BPD  Buku himpunan peraturan desa  Buku Lainnya  3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN  Gedung kantor atau Balai Pertemuan  Alat tulis kantor  Barang inventaris	0 unit 0 unit 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 Jenis
Komputer Mesin fax  2.B. Administrasi BPD  Buku-buku administrasi kegiatan BPD  Buku Buku Administrasi Keanggotaan  Buku kegiatan BPD  Buku himpunan peraturan desa  Buku Lainnya  3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN  Gedung kantor atau Balai Pertemuan  Alat tulis kantor  Barang inventaris  Buku administrasi  Jenis kegiatan	0 unit 0 unit 1 2 1 1 0 0 0 0 0 Jenis 1 Jenis
Komputer Mesin fax  2.B. Administrasi BPD  Buku-buku administrasi kegiatan BPD  Buku Buku Administrasi Keanggotaan  Buku kegiatan BPD  Buku himpunan peraturan desa  Buku Lainnya  3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN  Gedung kantor atau Balai Pertemuan  Alat tulis kantor  Barang inventaris  Buku administrasi  Jenis kegiatan	0 unit 0 unit 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 Jenis 1 Jenis 15 Jenis
Komputer Mesin fax  2.B. Administrasi BPD  Buku-buku administrasi kegiatan BPD  Buku Buku Administrasi Keanggotaan  Buku kegiatan BPD  Buku himpunan peraturan desa  Buku Lainnya  3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN  Gedung kantor atau Balai Pertemuan  Alat tulis kantor  Barang inventaris  Buku administrasi  Jenis kegiatan  Jumlah pengurus	0 unit 0 unit 1 2 1 1 0 0 0 0 0 Jenis 1 Jenis 15 Jenis 0 Orang
Komputer  Mesin fax  2.B. Administrasi BPD  Buku-buku administrasi kegiatan BPD  Buku Buku Administrasi Keanggotaan  Buku kegiatan BPD  Buku himpunan peraturan desa  Buku Lainnya  3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN  Gedung kantor atau Balai Pertemuan  Alat tulis kantor  Barang inventaris  Buku administrasi  Jenis kegiatan  Jumlah pengurus  Jumlah ruang kerja	0 unit 0 unit 1 2 1 1 0 0 0 0 0 Jenis 1 Jenis 15 Jenis 0 Orang
Komputer  Mesin fax  2.B. Administrasi BPD  Buku-buku administrasi kegiatan BPD  Buku Buku Administrasi Keanggotaan  Buku kegiatan BPD  Buku himpunan peraturan desa  Buku Lainnya  3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN  Gedung kantor atau Balai Pertemuan  Alat tulis kantor  Barang inventaris  Buku administrasi  Jenis kegiatan  Jumlah pengurus  Jumlah ruang kerja  D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	0 unit 0 unit 1 2 1 1 0 0 0 0 0 Jenis 1 Jenis 15 Jenis 0 Orang
Komputer Mesin fax  2.B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD Buku Buku Administrasi Keanggotaan Buku kegiatan BPD Buku himpunan peraturan desa Buku Lainnya  3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN Gedung kantor atau Balai Pertemuan Alat tulis kantor Barang inventaris Buku administrasi Jenis kegiatan Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja  D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	0 unit 0 unit 1 2 1 1 0 0 0 0 0 Jenis 1 Jenis 15 Jenis 0 Orang Ruang
Komputer  Mesin fax  2.B. Administrasi BPD  Buku-buku administrasi kegiatan BPD  Buku Buku Administrasi Keanggotaan  Buku kegiatan BPD  Buku himpunan peraturan desa  Buku Lainnya  3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN  Gedung kantor atau Balai Pertemuan  Alat tulis kantor  Barang inventaris  Buku administrasi  Jenis kegiatan  Jumlah pengurus  Jumlah ruang kerja  D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan  Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan	0 unit 0 unit 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 Jenis 1 Jenis 15 Jenis 0 Orang Ruang Ada
Komputer Mesin fax  2.B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD Buku Buku Administrasi Keanggotaan Buku kegiatan BPD Buku himpunan peraturan desa Buku Lainnya  3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN Gedung kantor atau Balai Pertemuan Alat tulis kantor Barang inventaris Buku administrasi Jenis kegiatan Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja  D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	0 unit 0 unit 1 2 1 1 0 0 0 0 0 Jenis 1 Jenis 15 Jenis 0 Orang Ruang
Komputer Mesin fax  2.B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD Buku buku Administrasi Keanggotaan Buku kegiatan BPD Buku himpunan peraturan desa Buku Lainnya  3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN Gedung kantor atau Balai Pertemuan Alat tulis kantor Barang inventaris Buku administrasi Jenis kegiatan Jumlah pengurus Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja  D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan	0 unit 0 unit 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 Jenis 1 Jenis 15 Jenis 0 Orang Ruang  Ada Ada
Komputer Mesin fax  2.B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD Buku Buku Administrasi Keanggotaan Buku kegiatan BPD Buku himpunan peraturan desa Buku Lainnya  3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN Gedung kantor atau Balai Pertemuan Alat tulis kantor Barang inventaris Buku administrasi Jenis kegiatan Jumlah pengurus Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja  D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	0 unit 0 unit 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 Jenis 1 Jenis 15 Jenis 0 Orang Ruang  Ada Ada Ada Ada
Komputer Mesin fax  2.B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD Buku buku Administrasi Keanggotaan Buku kegiatan BPD Buku himpunan peraturan desa Buku Lainnya  3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN Gedung kantor atau Balai Pertemuan Alat tulis kantor Barang inventaris Buku administrasi Jenis kegiatan Jumlah pengurus Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja  D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan	0 unit 0 unit 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 Jenis 1 Jenis 15 Jenis 0 Orang Ruang  Ada Ada
Komputer Mesin fax  2.B. Administrasi BPD Buku-buku administrasi kegiatan BPD Buku Buku Administrasi kegiatan BPD Buku Buku Administrasi Keanggotaan Buku kegiatan BPD Buku himpunan peraturan desa Buku Lainnya  3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN Gedung kantor atau Balai Pertemuan Alat tulis kantor Barang inventaris Buku administrasi Jenis kegiatan Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja  D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD	0 unit 0 unit 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 Jenis 1 Jenis 15 Jenis 0 Orang Ruang  Ada Ada Ada Ada

integration provision for the provision of the provision	Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan	0 kogiston
inmitiato dan peruplaciam perupleringanaam peruminintariam desa dan kelurahan disambilangiam perupakan dan perupakan peruminintariam desa dan kelurahan disambilangiam kenilah kopilatan yang beriat dingan upaka percepakan akadersa pembangan nesepartakan dan perupakan perupakan perupakan perupakan dan perupakan	lembaga kemasyarakatan	0 kegiatan
umbh kegalam yang lexial dengan upaya percepalan aku akselerasi pembangyanan desa dan kelurahan dalam bidara comi kelarapa nempanan bencara penegalapan herinakan penerintakan nebebangaan mangsatakan.  penerintah prakarina dan saran pedasan kelurahan, penerintakan nemerintahan dan keraban dalam penyelenggaran membanan dan saran penerintahan penerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaran membanan dan lembaga kemasyarakatan galakanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaran membanan mangsa perbantuan dan poliniakan kepada dasa, lumi dan perangkat masing-masing    Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan   Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan dan pelapatah pengangan pemerintahan desa dan kelurahan   Opera	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	1 kegiatan
sonomi kölungsi, poinenganan hornani, poranggilangan kemahikunan, perangkan manyarakat, mingilatan prasena dan sarrah podesan kiharah nyarahatan arumber daya and na herkoolig parti guru, angembanyan solali budaya masyarakat didesa dan kohurhan yang dibayak APBN		0 kegiatan
ementahan dan lembaga kemasyarakatan emberian sarksi sata penyimpengan yang dilakukan kepala desa, turah dan perangkat masing-masing Okali Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Keturahan edioman pelaksanaan tugaa pembaruhan dari provinsi ke desak-keturahan 11 decionan pelaksanaan tugaa pembaruhan dari provinsi ke desak-keturahan 11 decionan pelaksanaan tugaa pembaruhan dari provinsi ke desak-keturahan 11 decionan pelaksan dari pendagan dari perovinsi ke desak-keturahan dari sita d	Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN	0 jenis
Pembinaan Pemerintah Provinsi kopada Pemerintahan Desa dan Kelurahan  deman pelaksanaan higas pembantuan dari provinsi ke desakhelurahan  edeman bantaka keberadaan kesabaan masyarakat hukum adat, nilai adal istadat dan lembaga adat beserta hak dan wegitarnya dalam pelaksanaan pemerintahan desakheruahan  sejatara pelaksanaan pediorana administrata, itata naskah dan pelaporan dada istadat dan lembaga adat beserta hak dan wegitaran pediorana administrata, itata naskah dan pelaporan dada istadat dan lembaga adat beserta hak dan wegitaran pendioran administrata, itata naskah dan pelaporan dada kesadan kelurahan Ojenis gelatar peranggulangan kemiskharan yang dibisyak APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan Ojenis gelatar peranggulan beruan beruan yang dibisyak APBD Provinsi di desa dan kelurahan Ojenis gelatar peranggulan beruanga yang dibisyak APBD Provinsi di desa dan kelurahan Ojenis gelatar peranggulan selama satara dan prastaran dasa dan kelurahan yang dibisyak APBD Provinsi di desa dan kelurahan Ojenis gelatar peranggulan satara dan pastaran dasa dan kelurahan yang dibisyak APBD Provinsi di desa dan kelurahan sahara dan pastaran dan pengerahangan salah budaya masyarakat Pedorana pendataan dan pendayagunana data profil desa dan kelurahan sahaksi alas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan pengerapatananyan solala budaya masyarakat Pedorana pendataan dan pendayagunana data profil desa dan kelurahan dan beribaga kemasyarakatahan pemerintahan dan beribaga kemasyarakatahan pemerintahan dan beribaga kemasyarakatahan pemerintahan dan beribaga kemasyarakatahan pemerintahan dan beribaga kemasyarakatahan pengerapatan kewasangan kebupatah kebaga dasa dan kelurahan pengaturannya kepada desa dan kelurahan pengaturannya kepada desa dan kelurahan pengaturannya kepada desa dan kurah dan pengaturannya kepada desa dan kelurahan pengaturannya kepada desa dan kelurahan pengaturannya kepada desa dan kelurahan pengaturannya dalam pengaturannya kepada desa dan kelurahan dan pengaturannya dalam pengaturan pengaturan ke	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	0 kali
edoman paleksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desakelurahan didaman hantuan kerangan dari provinsi galatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyaraka hukum adat, nilai adat istadat dan lembaga adat beserta hak dan sejatan pelaksanaan pembantuan kesatuan masyaraka hukum adat, nilai adat istadat dan lembaga adat beserta hak dan masyarakan pedeman administriasi, lata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan luturahan giatan pendidakan dan pelaktian terlang penyeleggaraan perementahan desa dan kelurahan bersakala provinni giatan penanggulangan kensiskanan yang dibiaya APED Provinsi di desa dan kelurahan O jenis giatan pengangan bercana yang dibiaya APED Provinsi di desa dan kelurahan O jenis giatan pengangan bercana yang dibiaya APED Provinsi di desa dan kelurahan O jenis giatan pengangan bercana yang dibiaya APED Provinsi di desa dan kelurahan O jenis giatan pengandaan sarana dan prasearan desa dan kelurahan yang dibiaya APED Provinsi di desa dan kelurahan O jenis giatan pengandaan sarana dan prasearan desa dan kelurahan yang dibiaya APED Provinsi di desa dan kelurahan O jenis giatan pengandaan sarana dan prasearan desa dan kelurahan yang dibiaya APED Provinsi di desa dan Neberian pengangan yang dilakkanakapatahan pang dibiaya APED Provinsi di desa dan Neberian pengangan yang dilakkanakapatahan dan pendayagunaan data profi desa dan Ulurahan O jenis O	, ,	0 kali
edoman hartuan keuangan dari provinsi galatan faalista kabendaan keatahan masyarakat hukum adat, nilai adat istiudat dan lembaga adat baserla hak dan lawajbaannya dalam pelakebanaan pemerintahan desa-Kolurahan aliasta Pelaksanaan pedoman admiristasi, taka naska dan pelapran bagi kepala desa dan lurah 1 kegistan pendidikan dan pelathan tentang penyelenggaranan pemerintahan desa dan kelurahan open dan dan pelathan tentang penyelenggaranan pemerintahan desa dan kelurahan 0 jenis egistan penangulan kemistan yang dibayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan 0 jenis egistan penanguan bencana yang dibayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan 0 jenis egistan penanguan bencana yang dibayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan 0 jenis egistan penanguan bencana yang dibayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan 0 jenis dalahan penanguan bencana sarana dan presarana desa dan kelurahan yang dibayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan penanguan sama dan penanguan sama pendatanan dan penanguan yang dibayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan sumber daya akam dan penanghan teknologi tepat guna yang dibayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan sumber daya akam dan penanghan pendatanan dan penangkar masing masing 0 jenis emberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan penangkat masing-masing 0 jenis emberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan penangkat masing-masing 0 jenis emberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, kepala desa, kepala desa dan kelurahan dilam penyelenggarana persebatan pengatanan kepala desa dan kelurahan dalam pengatanan pen	2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
egilatan fisilitiasi koberadiaan kosahuan masyarakat hukum adat, nilai adal siladad dan lembaga adal beserla hak dan 1 milah kepilatan pendikannaan pemerintahan dasakurubahan makurubahan pelaksanaan pedoman administrasi, lata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah milah kepilatan pendikanna dan pendikan dan pelahian terlang penyeberganaan pemerintahan desa dan kelurahan perdikan dan pelahian herianga penyeberganaan pemerintahan desa dan kelurahan 0 jenis egilatan pendigatah pendigatah keluranga yang dibiayai APED Provinsi di desa dan kelurahan 0 jenis egilatan pendigatah pendigatah kelurahan gidisayai APED Provinsi di desa dan kelurahan 0 jenis egilatan pendigatah pendigatah kelurahan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APED Provinsi di desa dan kelurahan 0 jenis egilatan pendigatah pendigatah kelurahan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APED Provinsi di desa dan kelurahan dalam pendigatah pendigat	Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan	1
swigblannya dalam pelaksanan pemerintahan dasa-kelurahan  silatisa Pelaksanan pedaman antimistas, itata nasaka dan pelapran bagi kepata desa dan lurah  nihah kegiatan pendidikan dan pelathan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan  O jenis egiatan pendidikan dan pelathan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan  O jenis egiatan pendidikan dan pelathan tentang Pervisi yang masuk desa dan kelurahan  O jenis egiatan pengangan pengan pengangan pengelatan pengelatan pengelatan pengelatan pendigatan pendigatan pendigatan pendigatan pendigatan pendigatan pendigatan pendigatan pendigatan pengelatan pengelata	v i	1
umlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi olegatan penangulangan kemiskihan yang dibayai APBD Provinsi umtuk desa dan keturahan olegatan penanganan bencana yang dibayai APBD Provinsi umtuk desa dan keturahan olegatan pengatan pe	kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	1
eglatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis eglatan penanganan beranan yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan 0 jenis 0		O karistan
egistan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dari kelurahan ojenis ogistan pengatan pendapatan keluanga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dari kelurahan ojenis ogistan pengatan p		•
eglatan pendigatan pendigatan pendagatan kelurapa yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan gelatan penyediana sarana dan parasarna desa dan kurhanhan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan pendagatan penandatan sumber daya aiam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa an kelurahan gelatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan pemberian sankki atas penyimpangan yang diliakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Opinis emberian penghargaan atas prestasi yang diliaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan datam penyelenggaran memerihahan dan tembaga kemasyarakatan  Pembinaan Pemerihata Kabupatan/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan elimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Opinis edoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Opinis edoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, kepulusan Lurah dan peraturan daerah kepada pala desa dan lurah.  1 jenis edoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, kepulusan Lurah dan peraturan daerah kepada pala desa dan lurah.  2 jenis dedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, kepulusan Lurah dan peraturan daerah kepada pala desa dan lurah.  3 jenis beraturahan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan beraturahan peraturahan perencimahan desa-kehurahan beraturahan peraturahan peraturahan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan peraturahan pera		,
sejatan penyedian sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan burahan na kelurahan pengambangan sosial budaya masyarakat Padoman pendahaan dan pendayagunaan data profil desa dan burahan an kelurahan dan pengambangan sosial budaya masyarakat Padoman pendahaan dan pendayagunaan data profil desa dan burahan amberian penghargaan atas prestasi yang diakasanakan pemerintahan dan perangkat masing-masing opinis memerintahan dan lembaga kemasyarakatan penerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan opinis memerintahan dan kembaga kemasyarakatan an kelurahan desa dan kelurahan delimpahan tugas BuyatiWalikota kepada Lurah dan Kepala Desa Opinis enetapan pengaturan kewanangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Opinis enetapan pengaturan kewanangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Opinis enetapan pengaturan kewanangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Opinis enetapan pengaturan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan derah kepada pala desa dan turah.  1 jenis pala desa dan turah.  2 jenis sadan kelurahan perenuanan perambangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan gajatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istadat dan lembaga adat beserta hak dan wejibannya dalam pelaksanana pemerintahan desakahkurahan pendama dan pelatishan pemerintahan desakahkurahan desa dan kelurahan jenis malaka kejatan pendama dan kelurahan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan jenis malaka kejatan penanggulangan kemasiyana kekurahan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan jenis egiatan pengangan pedoman dan kandar tanda jabatan, pakaia dinas dan atribut bagi kepala Desa, Lurah, Perangkat jenis egiatan pengagana pedoma dan sandar tanda jabatan		•
slurahan gejatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang diblayai APBD Provinsi di desa an kolurahan gejatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang diblayai APBD Provinsi di desa dan kulurahan gejatan pengembangan sosial budaya masyarakal Pedoman pendalaan dan pendayagunaan data profil desa dan burahan memberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing  O jenis  Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan amerintahan dan kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan elimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa enetapan penghutaran kewenangan Abuputen/Kota kapada Desa enetapan penghutaran kewenangan Abuputen/Kota kapada Desa endapan pendiaran kewenangan Abuputen/Kota kapada Desa endapan tentis penyusunan peraturan desa, peraturan kebala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada jolinis edoman teksin penyusunan peraturan desa, peraturan kebala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada desa doman teksin penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan jenis gajatan fasititasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istadat dan lembaga adat beserta hak dan peraturan kekurahan perimbangan untuk desa gajatan fasititasi keberadaan hesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istadat dan lembaga adat beserta hak dan peraturan kelurahan perimbangan untuk desa gajatan fasititasi keberadaan pendidikan dan perimbangan untuk desa jenis penjatan pendidikan dan pelathan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan jenis gajatan penanganah bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan jenis gajatan penanganah bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan jenis gajatan penanganah pendatan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istadat dan lembaga adat beserta hak dan jenis gajatan penanganah pendatan penganah penan		U jenis
an kelurahan gulatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan burahan merinatan dan tembaga kemasyarakat nemberian sanksi data penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing  O jenis  Pembinaan Pemerintah Kabupatan/Kota kepada Pemerintahan Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan merintahan dan tembaga kemasyarakatan  Pembinaan Pemerintah Kabupatan/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan elimpahan lugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Dasa enelapan penghataran kewanagan akupualen/kota yang diserahkan pengalurannya kepada desa  O jenis demanan pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa doman tekira penyuguanan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada japia desa dan lurah deman tekira penyuguanan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada sapial desa dan lurah deman tekira penyuguanan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan japial desa dan lurah dedoman tekira penyuguanan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan japial desa dan lurah delaman pelaksanaan pemerintahan desakelurahan janis sadian kelurahan pelaksanaan pemerintahan desakelurahan janis sadian kelurahan pelaksanaan pemerintahan desakelurahan janis salitasi keberadaan kesatuan mayarakat hukum adat, nilai adat istladat dan lembaga adat beserta hak dan janis salitasi pelaksanaan pedoman administrasi, lata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan kelurahan janis salitasi pendapatan kemasikian yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan janis salitasi penanganah bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan janis salitasi penelapana pedatan kelurahan pengalatan penanganan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan jenjatan pendataan pendapatan kelusahan pendatan kelurahan pendatan pendapagan kemiskinan yang dibakan	kelurahan	0 jenis
ellurahan openberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Ojenis emberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan memerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Upanahan ugas Bupatiwalikota kepada Lurah dan Kepala Desa Ojenis enetapan pengaturan kewanangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Ojenis enetapan pengaturan kewanangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Ojenis edoman pelaksanan pentahuan dari kabupaten/kota kepada desa Ojenis edoman pelaksanan pentahuan dari kabupaten/kota kepada desa Ojenis edoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada pala desa dan lurah urah. Hanga penyelangan perebangan perebangan peraturan daerah kepada pala desa dan lurah urah. Penyasunan perenanaan pembangan untuk desa dan kelurahan elekanan peksakanan pedama andam desa/kelurahan desa/kelurahan desa/kelurahan desa/kelurahan pembisyasan olokasi dana perimbangan untuk desa salistias Pekaksanan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan kurah 1 jenis untuk penangan peraturah dan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan dasa dan kelurahan bersakal bipaten/kota bagiatan penanganan bencana yang dibiayal APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan Ojenis egiatan penanganan bencana yang dibiayal APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan Ojenis egiatan penangan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat egiatan penangan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat egiatan penangan pedoman dan bardar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat egiatan pengharan pedoman dan beradayatan berada kelurahan dan pendayagunaan perenit melapa demasyarakatan dan pendayagunaan perenit melapa demasyarakatan dan pendayaguna	dan kelurahan	0 jenis
emberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan memerintahan dan lembaga kemasyarakatan pemerintahan Desa dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dera dan Kelurahan Desa dan Kelurah	kelurahan	,
Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan elimpahan tugas Bupatin/Walikota kepada Lurah dan Kepada Desa olemapan pengaturan kewanangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa olemia dedoman belaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa olemia dedoman tekins penyusunan peraturan desa, perturan kepada desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada pala desa dan lurah. dedoman tekins penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan jepita desa dan lurah. dedoman tekins penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan jepita deman tekins penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan jepita deman tekins penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan jepita deman tekinsa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istadat dan lembaga adat beserta hak dan jerita pendidikan pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan pentapan penbiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa salitiasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah tipinis pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala bupaten/kota pegitatan penanggulangan kemiskinan yang dibayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan jegitatan penanggulangan kemiskinan yang dibayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan jegitatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan jegitatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan jegitatan peningkatan pedaman dan standar tanda jababan, pakaian dinasa dan aribu bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat salikisi penetapan pedoman dan standar tanda jababan, pakaian dinasa dan aribu bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat salikisi penetapan pedoman dan standar tanda jababan, pakaian dinasa dan aribu bagi Kepala Des		0 jenis
elimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa entapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa 0 jenis edoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa doman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa edoman teknis peryusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada pala desa dan lurah.  1 jenis pala desa dan lurah.  2 jenis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan egiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilal adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan wajibannya dalam pelaksanaan pembangan untuk desa salitiasi Pelaksanaan pedman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah 1 jenis salitiasi Pelaksanaan pedman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah 1 jenis salitiasi Pelaksanaan pedman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan kelurahan berskala ti jenis salitiasi pelaksanaan pedman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan kelurahan berskala ti jenis segiatan pennaggulangan kemiskinan yang dibiayal APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis gejatan pennaggulangan kemiskinan yang dibiayal APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis segiatan pennaggulan penderanan pendaga pendagan kemasatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan wajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan 0 jenis segiatan peningkatan pendayagunaan profil desa dan kelurahan 0 jenis segiatan peningkatan pendayagunaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascapertombaan desa dan kelurahan 0 jenis sepatan pendagan alas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dan pendayagunaan setra anggaran kelurahan dan pendayagunaan desa serta anggaran keluraha	Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	0 jenis
elimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa entapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa 0 jenis edoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa doman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa edoman teknis peryusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada pala desa dan lurah.  1 jenis pala desa dan lurah.  2 jenis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan egiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilal adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan wajibannya dalam pelaksanaan pembangan untuk desa salitiasi Pelaksanaan pedman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah 1 jenis salitiasi Pelaksanaan pedman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah 1 jenis salitiasi Pelaksanaan pedman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan kelurahan berskala ti jenis salitiasi pelaksanaan pedman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan kelurahan berskala ti jenis segiatan pennaggulangan kemiskinan yang dibiayal APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis gejatan pennaggulangan kemiskinan yang dibiayal APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis segiatan pennaggulan penderanan pendaga pendagan kemasatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan wajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan 0 jenis segiatan peningkatan pendayagunaan profil desa dan kelurahan 0 jenis segiatan peningkatan pendayagunaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascapertombaan desa dan kelurahan 0 jenis sepatan pendagan alas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dan pendayagunaan setra anggaran kelurahan dan pendayagunaan desa serta anggaran keluraha		
enetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa edoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa edoman tekris penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada pala desa dan turah.  doman tekris penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan sas dan kelurahan egiatan fisalitisas keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan penjatan fisalitisas keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan enetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa salitiasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah 1 jenis lulah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala 1 jenis pelatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan 1 jenis gejatan penanggalangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan 1 jenis gejatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan 1 jenis gejatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan 1 jenis gejatan fisalitisa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan 2 jenis gejatan fisalitisa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan 2 jenis gejatan fisalitisa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan 3 jenis gejatan fisalitisa keberadaan kesatuan mesyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan 3 jenis gejatan fisalitisa keberadaan kesatuan metivasi desa/kelurahan 3 jenis gejatan fisalitisa keberadaan kesatuan metivasi desa/kelurahan adara pengagana kelurahan 3 jenis gejatan fisa	·	
edoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaterikota kepada desa den doman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa dan lurah.  dedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada pala desa dan lurah.  dedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada pala desa dan lurah.  dedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada desa dan kulturahan palaksan dan peraturan daerah kepada desa dan kelurahan penbaga adat beserta hak dan wagibannya dalam pelaksanaan pedeman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah 1 jenis alialisah Pelaksanaan pedeman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan kelurahan berskala 1 jenis abupaterikota mengaluangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaterikota yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis egiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaterikota yang masuk desa dan kelurahan 1 jenis egiatan penanggulangan kemiskinan keluarga yang dibiayai APBD kabupaterikota yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis adilata penanggulangan kemiskinan keluarga yang dibiayai APBD kabupaterikota yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis egiatan penanggulangan keluarga yang dibiayai APBD kabupaterikota yang masuk desa dan kelurahan 1 jenis egiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaterikota di desa dan kelurahan 0 jenis asalikasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat 1 jenis egiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan 2 jenis egiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan 2 jenis egiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan 2 jenis egiatan fasilitasi kemisan penanganan penangana		,
edoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa dan lurah.  edoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan apala desa dan kelurahan disa dan kelurahan open dalam pelaksanaan pemerintahan desa, kelurahan open dalam pelaksanaan pemerintahan desa, kelurahan disa perintahan desa, butah dan peraturan desa dan kelurahan dan pemerintahan desa, butah dan peraturan desa dan kelurahan dan pemerintahan desa, butah dan peraturan desa dan kelurahan dan peraturan desa dan kelurahan dan pemerintahan desa, butah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelengaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala 1 jenis abupaten/kota penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan 1 jenis egiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan 1 jenis egiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan 1 jenis 1		
pala desa dan Juráh.  dedoman teknis penyusuanan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan asa dan kelurahan  giatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan wayilbannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan  ol penis  alisiliasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah  1 jenis  milah kejatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala abupaten/kota  giatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan  ol jenis  giatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan  ol jenis  giatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan  ol jenis  giatan peningkatan pendapatan kelurarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan  ol jenis  sasi/kelurahan dan BPD  giatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan  ol jenis  giatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan  ol jenis  giatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan  ol jenis  giatan fasilitasi keberadaan pemerintahan desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan  ol jenis  gemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan desa dan kelurahan  ol jenis  memerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan  emberian penghargaan atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing  ol kasus  engawasi pengelolaan keuangan desa dan kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan  taksus  pemerintahan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan  pemerintahan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan  milah Kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi da		0 jenis
gejatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan pengeijatan pembiayaan alokasi dana pemerintahan desa/kelurahan 1 jenis asilitasi Pelaksanaan pederintahan administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah 1 jenis asilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan kelurahan berskala 1 jenis abupaten/kota untuk desa dan kejatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala 1 jenis egiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis egiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis egiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan 0 jenis egiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan 0 jenis esa/Kelurahan dan BPD egiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan 0 jenis esa/Kelurahan dan BPD egiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan pengiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan 0 jenis ediatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan 0 jenis ediatan pengelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan 1 jenis rogram dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan 0 jenis emberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing engalan sangaran keuangan desa dan pengayagunaan saset pengelolaan keuangan desa dan pengayagunaan saset desa sestra anggaran kelurahan 1 kali mala kegiatan fasilitasi penkasanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota	kepala desa dan lurah.	1 jenis
awajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan enetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa asilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah 1 jenis mlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala abupaten/kota egiatan penangganan bencana yang dibiayal APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan 0 jenis egiatan peningkatan pendagatan keluaray ayng dibiayal APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan 0 jenis egiatan peningkatan pendagatan keluaray ayng dibiayal APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan 0 jenis asilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat egiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan 0 jenis egiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan 0 jenis edoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan 1 jenis rogram dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan 0 jenis emberian sanksi atas persitasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan merintahan dan pemberdayagunaan profil desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan merintahan dan pemberdayagunaan gan dikakuan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 0 kasus lengawasi penglolalan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan saha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah  Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan  unlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa 1 kali unlah kegiatan fasilitasi pengalakan pendayagunaan aset desa sera anggaran kelurahan 1 kali unlah kegiatan fasilitasi pengakan pendayagunaan aset desa sera anggaran kelurahan 1 kali unlah kegiatan fasilitasi peplaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang di	desa dan kelurahan	1 jenis
asilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah  1 jenis  1 jenis  1 jenis  1 jenis  2 jenis  2 jenis  2 jenis  2 jenis  2 jenis  3 jenis  3 jenis  3 jenis  3 jenis  4 jenis  5 jenis  5 jenis  6 jediatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan  5 jenis  6 jediatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan  6 jenis  8 jenis  8 jenis  8 jenis  8 jenis  9 jenis  9 jenis  9 jenis  9 jenis  1 jenis  9 jenis  9 jenis  9 jenis  1 jenis  9 jenis  9 jenis  9 jenis  1 jenis  9 jenis  9 jenis  9 jenis  9 jenis  9 jenis  1 jenis  9	kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	0 jenis
unlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala bupaten/kota bupaten/kota panggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan 0 jenis egiatan penangganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan 1 jenis egiatan peningkatan pendapatan keluraga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan 0 jenis sailitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat 1 jenis esa/kelurahan dan BPD egiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan 0 jenis ediatan pendasan adan pendayagunaan profil desa dan kelurahan 1 jenis edoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan an an kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan 0 jenis emberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan 1 jenis emberian apenghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan 1 jenis emberian apaksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing 0 kasus lengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan lakau saha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah 1 kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa 1 kali malah kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan 1 kali malah kegiatan fasilitasi pengelakan pamaman desa dan kelurahan 1 kali malah kegiatan fasilitasi pengelakan paraturan perundang-undangan 1 kali malah kegiatan fasilitasi pengakan peraturan perundang-undangan 1 kali malah kegiatan fasilitasi pengelakan pamaman data profil desa dan kelurahan 1 kali malah kegiatan fasilitasi pengakan pengakan peraturan perundang-undangan 1 kali malah kegiatan fasilitasi pengelakan pamaman		,
abupaten/kota   Iperis   egiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan   Iperis   egiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan   Iperis   egiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan   Openis   asilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat   segiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan   Openis   egiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan   Openis   egiatan pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan   Openis   edoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan   Openis   embarian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan   emberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan   emberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing   Openis   embarian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing   Openis   embarian sanksi atas penyimpangan yang dikelola lurah    Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan    Inalah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan   Openis    Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan    Inalah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan pentaryan kepala desa   Openis    Inalah kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kelurahan   Openis    Inalah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa   Openis    Inalah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan    Inalah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa    Inalah kegiatan fasilitasi pelaks		1 jenis
egiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan 1 jenis egiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan 3 jenis asalitiata pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan asalitiata pendapatan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan egiatan pendaksanaan pemerintahan desa/kelurahan 20 jenis ediaman pendaksanaan pemerintahan desa/kelurahan pendaksanaan pemerintahan desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan 0 jenis emberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dan pemberdayagunaan profil desa dan kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan 0 jenis emberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dan pempelenggaraan 1 jenis emberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan dan penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan dan penghargaan satas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 0 kasus lengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan 1 kasus 1 kali amlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kelurahan 1 kali asalitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan 1 kali asalitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan 1 kali asalitasi pengelokaan keuangan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan 1 kali asalitasi pengelokaan peraturan perundang- undangan 1 kali asalitasi pengelakanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa 1 kali asalitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan 1 kali asalitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan 1 kali asalitasi penyediaan data dan pendayagunaan ketenteraman dan ketert	kabupaten/kota	,
egiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan asilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat sea/Kelurahan dan BPD egiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan ewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/Kelurahan edoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan rogram dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan o jenis emberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan emberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan emberian sanksi atas penyimpangan yang diliakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing o kasus lengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan lakasaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah  Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan unlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa 1 kali asilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan 1 kali unlah Kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa 1 kali asilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan 1 kali unlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan mbaga kemasyarakatan 1 kali unlah kegiatan fasilitasi peraturan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa 1 kali unlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan 1 kali anlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
asilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat esa/Kelurahan dan BPD egiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan pengiatan pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan edoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan 1 jenis rogram dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan 0 jenis emberian penghargaan atas prestasi yang dicapal pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan emberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 0 kasus lengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan saha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dilkelola lurah  Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan umlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa  I kali umlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kelurahan 1 kali asilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan 1 kali asilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan 1 kali asilitasi pengedaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan 1 kali asilitasi pengediaan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa 1 kali asilitasi pengediaan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan mbaga kemasyarakatan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi paya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum alika kegiatan fasilitasi pengelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa 1 kali anlah kegiatan fasilitasi pengelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa 1 kali anlah kegiatan fasilitasi pengelaksanaan tugas, pen		,
esa/Kelurahan dan BPD egiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan egiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan edoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan 1 jenis rogram dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan emberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan emberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 0 kasus lengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan saha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah  Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan  Inlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa  Inkali umlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kelurahan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa 1 kali umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa 1 kali asilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan asilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan mbaga kemasyarakatan  Inkali umlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kelerteraman dan ketertiban umum asilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa an kelurahan  Inkali asilitasi penataan penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa an kelurahan  Inkali asilitasi penataan pengestarian hasil pembangunan.		0 jenis
ewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan 1 jenis rogram dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan 0 jenis emberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan 1 jenis emberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan 1 jenis emberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 0 kasus lengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan 1 kasus engama maliki desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah 1 kali umlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa 1 kali umlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa 1 kali asilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa 1 kali asilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan mbaga kemasyarakatan umlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 1 kali umlah kegiatan fasilitasi penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa 1 kali umlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan	Desa/Kelurahan dan BPD	1 jenis
rogram dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan  I jenis emberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan o kasus emeberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing o kasus lengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan saha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah  Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan  Lumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Lumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan asilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan 1 kali Lumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa 1 kali asilitasi penerapan dan pengakan peraturan perundang- undangan 1 kali asilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan 1 kali Lumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan Imbaga kemasyarakatan 1 kali Lumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 1 kali Lumlah kegiatan fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa an kelurahan Lumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan antat pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan. 4 kali asilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga  O kali	kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	,
emberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan emerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lurah dan perangkat masing-masing 0 kasus lengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan saha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah lakesa dan pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan lakesa dan selitasi pengusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa dan lakesa dan kelurahan lasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan lakejiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa lakeli lasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan lakelurahan lakejiatan fasilitasi pengelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan mbaga kemasyarakatan lakeli lasilitasi pengalaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan mbaga kemasyarakatan lakeli lasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa lakelurahan lakegiatan fasilitasi patisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan lata pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.		•
emerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan emberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing lengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan saha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah  Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan  Imlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa I kali  Imlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan I kali  Isali asilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan I kali  Isali asilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan I kali  Isali asilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan Isalilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan Isali asilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan  Inlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan  Inlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Inlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Isali kali  Isali asilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa an kelurahan  Inlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan  Itali  Isali		o jenis
lengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan lasaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah lasaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah lasaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah lasaha milik desa dan pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan lamlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa lamla kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan lasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan lasilitasi penserapan dan penegakan peraturan perundang- undangan lasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan lasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan lasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan lasilitasi penyediaan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan mbaga kemasyarakatan lasilitasi penyedian fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum lasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa lan kelurahan umlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan larta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.	pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	,
Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan  I kali		บ หลอนอ
umlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa 1 kali umlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan 1 kali asilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa 1 kali asilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan 1 kali asilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan mbaga kemasyarakatan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 1 kali asilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa an kelurahan umlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan arita pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan. 1 kali asilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga 0 kali	Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran keluranan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah	1 kasus
umlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa 1 kali umlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan 1 kali asilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa 1 kali asilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan 1 kali asilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan mbaga kemasyarakatan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 1 kali asilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa an kelurahan umlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan arita pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan. 1 kali asilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga 0 kali	4. Pombingan dan Bengguyasan Camat kenada Desa/Kalurahan	
umlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan asilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa 1 kali asilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan asilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan mbaga kemasyarakatan umlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 1 kali asilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa an kelurahan umlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan erta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan. asilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga 0 kali	·	1 kali
asilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa 1 kali asilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan 1 kali asilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan mbaga kemasyarakatan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 1 kali asilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa an kelurahan umlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan erta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan. 1 kali asilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga 0 kali		
umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa 1 kali asilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan 1 kali asilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan mbaga kemasyarakatan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 1 kali asilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa an kelurahan umlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan erta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan. 1 kali asilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga 0 kali		
asilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan 1 kali asilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 1 kali asilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa an kelurahan umlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan erta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.  1 kali asilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga 0 kali	. 0 0 1 70 00	
asilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 1 kali asilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa an kelurahan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan erta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan. asilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga 0 kali		
umlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan habaga kemasyarakatan 1 kali umlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 1 kali asilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa an kelurahan umlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan erta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.  1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 4 k		
umlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 1 kali asilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa an kelurahan umlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan erta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan. asilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga 0 kali	Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan	
asilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa an kelurahan umlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan erta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.  1 kali asilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga 0 kali	• •	1 kali
umlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan erta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.  1 kali asilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga 0 kali	Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	
asilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga 0 kali	Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan	1 kali
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 kali
лінан кедіатан назінтазі ретакзанаан ріодіані чан кедіатан реніренчауван шазувнакат ———————————————————————————————————	Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	1 kali

	41. 8
Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan	1 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat	0 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya	1 kali
Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.	1 kali

KAB. PURWAKARTA, 11 Mei 2023 CIHERANG Kecamatan Pasawahan Kabupaten KAB. PURWAKARTA

# <u>NANDANG</u> Kepala Desa

- Tembusan : 1. Camat Pasawahan 2. Bupati KAB. PURWAKARTA 3. Arsip